

**ANALISIS PENGARUH KOMITE AUDIT DAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH**

(Studi Empiris pada Bank Syariah di Negara Indonesia dan Malaysia

Tahun 2014-2018)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**ENDI DESWANTO
NIM. 12030116120070**

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2020

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Endi Deswanto
Nomor Induk Mahasiswa : 12030116120070
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/S-1 Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KOMITE AUDIT
DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK
SYARIAH (Studi Empiris pada Bank Syariah di
Negara Indonesia dan Malaysia Tahun 2014-
2018)**

Dosen Pembimbing : Dr. Dra. Indira Januarti., S.E., M.Si., Akt

Semarang, 09 Maret 2020

Dosen Pembimbing,



(Dr. Dra. Indira Januarti., S.E., M.Si., Akt)

NIP. 196401011992022001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Endi Deswanto
Nomor Induk Mahasiswa : 12030116120070
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/S-1 Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KOMITE AUDIT
DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK
SYARIAH (Studi Empiris pada Bank Syariah di
Negara Indonesia dan Malaysia Tahun 2014-
2018)**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 April 2020 dan telah dinyatakan LULUS

Ketua Tim Penguji : Dr. Dra. Indira Januarti., S.E., M.Si., Akt
Anggota : 1. Dr. Paulus Theodorus Basuki H MBA, MSAcc
2. Aditya Septiani S.E., M.Si., Akt

Semarang, 01 Mei 2020

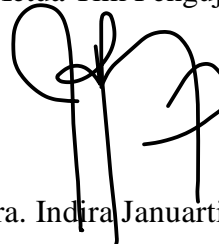
Ketua Departemen Akuntansi



Fuad, M.si, Ph.D

NIP. 197909162008121002

Ketua Tim Penguji



Dr. Dra. Indira Januarti., S.E., M.Si., Akt

NIP. 196401011992022001

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Endi Deswanto, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“Analisis Pengaruh Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Empiris pada Bank Syariah di Negara Indonesia dan Malaysia Tahun 2014-2018)”** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 14 April 2020

Yang membuat pernyataan,



(Endi Deswanto)

NIM. 12030116120070

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong (agama) Allah,
Niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”**

(Q.S Muhammad : 7)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 6)

“Man Jadda Wajada”

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil)

-PERSEMBAHAN-

*Skripsi ini ku persembahkan untuk
kedua orang tuaku tercinta yang tak kenal lelah
selalu memberikan semangat, yundha, adik-adikku, guruku, mentorku,
sahabat yang selalu support, keluarga besar KSEI FEB UNDIP, BEASTUDI
ETOS serta FOSSEI REGIONAL JAWA TENGAH.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bukti empiris mengenai pengaruh ukuran komite audit, pertemuan komite audit, ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS), keahlian Dewan Pengawas Syariah (DPS), pertemuan Dewan Pengawas Syariah (DPS), remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kinerja keuangan bank syariah. Variabel dependen dalam penelitian yaitu kinerja keuangan bank syariah yang diukur dengan *Return on Asset (ROA)*. Penelitian ini juga mempunyai variabel kontrol yaitu ukuran bank dan umur bank.

Populasi dalam penelitian yaitu seluruh perbankan syariah di 2 (dua) negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Total sampel dalam penelitian berjumlah 21 perbankan syariah selama periode 2014-2018, sehingga total pengamatan berjumlah 105 sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu model regresi linear berganda.

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa ukuran komite audit, ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS), keahlian Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan bank syariah, sedangkan ukuran bank memiliki pengaruh negatif. Selain itu pertemuan komite audit, pertemuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan umur bank tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Kata kunci: kinerja keuangan, perbankan syariah, *corporate governance*, komite audit dan Dewan Pengawas Syariah

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze empirical evidence regarding the effect of audit committee size, audit committee meetings, Sharia Supervisory Board (SSB) size, Sharia Supervisory Board (SSB) expertise, Sharia Supervisory Board (SSB) meetings, Sharia Supervisory Board (SSB) remuneration on the financial performance of Islamic banks. The dependent variable in the study is the financial performance of Islamic banks as measured by Return on Assets (ROA). This study also has control variables namely the bank size and the bank age.

The population in this study is all Islamic banking in 2 (two) countries, namely Indonesia and Malaysia. The determination of the sample in this study used a purposive sampling technique with certain criteria. The total sample in the study amounted to 21 Islamic banks during the period 2014-2018, so the total number of observations totaled 105 samples. The analytical method used in this research is multiple linear regression models.

The results of the analysis show that audit committee size, Sharia Supervisory Board (SSB) size, Sharia Supervisory Board (SSB) expertise, and Sharia Supervisory Board (SSB) remuneration have a significant positive effect on financial performance of islamic banks, while the bank size has negative effects. In addition, audit committee meetings, Sharia Supervisory Board (SSB) meetings and the bank age did not significantly influence on the financial performance of Islamic banks.

Keywords: *financial performance, Islamic banking, corporate governance, audit committee and Sharia Supervisory Board*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil Alamiin. Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang serta pertolongan yang sangat luar biasa kepada penulis. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan bagi seluruh umatnya hingga hari akhir nanti. Suatu kebahagiaan bagi penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS PENGARUH KOMITE AUDIT DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH (Studi Empiris pada Bank Syariah di Negara Indonesia dan Malaysia Tahun 2014-2018)” sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan doa, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Atas doa, dukungan serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, memberikan kekuatan untuk terus berjuang, memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Mamah dan Papahku tercinta yang selalu mendoakan anaknya, memberikan semangat untuk terus menggapai mimpi-mimpiku, membuatku lebih tegar,

memberikan dukungan yang tidak pernah terputus. Semoga besok aku bisa membuat bangga mamah sama papah.

3. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh pendidikan Program Sarjana (S1).
4. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Bapak Fuad, S.E.T., M.Si., Ph.D selaku Ketua Departemen Akuntansi yang telah memberikan motivasi yang membangun bagi penulis.
6. Dr. Dra. Indira Januarti., S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing atas waktu, perhatian, bimbingan dan motivasinya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Prof. Drs. H. Tarmizi Achmad MBA., Ph. D., Akt., CA., CPA., CFE., CfrA. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dan memberikan nasihat serta masukan kepada penulis dari awal hingga akhir studi.
8. Bapak/ibu dosen dan seluruh staf pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan bekal berupa ilmu serta berbagi pengalaman yang sangat bermanfaat kepada penulis.
9. Dosen yang telah memberikan pelajaran yang sangat berharga dan berkesan tentang makna kehidupan Prof. Dr. M Syafruddin S.E., M.Si., Akt tentang 2 hal penting yang harus diperjuangkan yaitu Jujur dan Sungguh-sungguh.

10. Segenap karyawan tata usaha, staf perpustakaan, petugas kebersihan, takmir masjid ekonomi, petugas keamanan atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
11. Yundha Eka Oktarina dan adik-adikku Entori Mardiansyah, Esi Putri, Ersan Junanda yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dari awal kuliah hingga akhir penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak. Semoga besok kita jadi orang sukses semua. Aaminn
12. Para mentor-mentorku di Beastudi Etos Semarang, Mas Zamak, Mas Nurul, Mas Ilham, Mas Hafiz, Mas Taufik, Mas Aksen, Mas Bagus yang telah membina baik ruhani dan prestasi selama di Etos.
13. Keluarga Isra Al-Mukhtar Lulut, Izzur, Ojan, Bachtiar, Opal, Roni, David, Guntur, Ida, Dania, Ummy, Ayu, Indri, Dian, yang ditempa bareng-bareng waktu pembinaan Etos Semarang. Terimakasih atas kebersamaannya. Semoga kita bisa benar-benar menjadi PEMUDA KONTRIBUTIF (Pemimpin, Unggul, Mandiri, Akhlak Islami, Kontributif).
14. Sahabat yang dari awal masuk etos dan kuliah, punya banyak kesamaan, seorang thinking, temen kos kemana-mana bareng, kemasjid bareng, makan bareng. Thanks to Lulut Nugroho calon Bupati Batang dimasa depan. Sampai ketemu di Parlemen Tahun 2045.
15. Keluarga besar KSEI FEB UNDIP, MIZAN FEB UNDIP, BEM FEB PROGRESIF yang telah menjadi wadah untuk Self Improvment bagi penulis untuk belajar mengenai Ekonomi Islam, Dakwah, dan Riset.

16. KSEI SERU yang telah membina dan mendidik penulis untuk terus meningkatkan kemampuan diri dan prestasi (Mas Vega, Mas Fajar, Mb Eka, Mas Aab, Mb Lila, Mas Owe, Mas Manarul).
17. Keluarga Besar KSEI CERIA 2017/2018 yang sangat aku sayangi, yang telah memberikan kenangan terindah selama di kampus tercinta (Rio wapres, Marlita sekum, shafira bendum, Anggun dan Zulva SDI, Faiq Manager Kalit, Dwi Kabiro Kajian, Kamila Kabiro Pepsi, Cinta Kabiro Acara, Boma Manager Humas, Tata Kabiro Media, Sakina Kabiro Jaringan, Maulida dan Romu BI).
18. Keluarga besar FOSSEI JAWA TENGAH 2018/2019 yang sangat aku sayangi, yang telah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa, bisa keliling Jateng, tempat belajar mengenai Ekonomi Islam, bisa mengenal banyak tokoh (Ayya, Khalim, Katsir, Kamila, Anggun, Boma, Novera, Riris, Dina, Ilham, Ana, Mas Ibnu, Shofi, Millati, Alex, Aulia, Rian)
19. Seluruh Aktivis KSEI Se-Jawa Tengah, Para Presidium Nasional FoSSEI 2018/2019, Para Koordinator Regional FoSSEI se-Indonesia periode 2018/2019. Terimakasih atas kontribusinya dalam dakwah ekonomi islam, sebuah kehormatan bisa menjadi bagian dari pejuang Ekonom Rabbani.
20. Kaderisasi Mizan FEB UNDIP 2017/2018 yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasihat (Mb Gina, Mb Syanas, Kamila, Shofa, Naufal, Rito).
21. Akademik BEM FEB UNDIP PROGRESIF 2017/2018 atas kebersamaan serta bimbingannya (kak Dinda, kak Kalies, bang Jo, kak Shafira, kak Faly, Syukron, kak Nabella, kak Ela, Rifka, Rizki, Cyntia).

22. Team lomba Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak menemani lomba-lomba di berbagai kampus di Indonesia (Kamila, Mia, Anggun, Salsa, Cici, Albi, Irsyad, Mas Manarul, Mb Eka, Mb Lila). Terimakasih sudah menemani keambisanku selama kuliah.
23. Teman-teman seperbimbingan “Indira Squad S.Ak” atas perjuangan yang sama-sama kita lakukan, Semoga menjadi kenangan indah dalam memperjuangkan skripsi (Julian, Adi, Maul, Rani, Desi, Zakiah, Angga, Nanang). Semoga sukses kedepannya!
24. Keluarga besar dan teman hidup selama 30 hari KKN Tematik Desa Bedono, Demak khususnya Padepokan WARAS princes Aurora (Vina), Princes Marmed (Inuy), Princes Jasmine (Eta). Terimakasih telah menjadi kawan ngobrol, teman nongkrong sampai tengah malam sambil lihatin bulan, tempat curhat, teman nge-WIFI bareng, temen ngambis. Semoga besok jadi orang sukses semua ya. Aaminn
25. Keluarga besar Mahasiswa Lampung (Anggun, There) sama-sama Akuntansi. Kakak dari Tulang Bawang Barat yang sudah banyak membantu (Kak Lusi, Ahi Jaka, Bang Yudi).
26. Sahabat SMA tempatnya diskusi dan ngobrol. Thank to Zellin dan Sayidati semoga sukses selalu.
27. Teman Super di Akuntansi, Teman Diskusi dan belajar bareng Levandi Terus Share kebaikan tanpa lelah. Terimakasih banyak atas waktunya. Tetap Semangat!

28. Keluarga besar Mahasiswa Program Studi Akuntansi angkatan 2016.

Terimakasih sudah kebersamai selama perkuliahan dan akan menjadi pengalaman yang sangat berkesan.

29. Semua Pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa materil, doa, motivasi, dukungan dan bimbingannya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segalanya.

Dengan kerendahan hati semoga apa yang telah diberikan oleh semua pihak yang telah disebutkan diatas dapat menjadi amal jariyah dan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, sehingga dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan agar dapat menjadi lebih baik.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang turut andil dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak serta menambah ilmu dan wawasan bagi pembaca.

Semarang, 14 April 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Endi Deswanto', with a small 'SA' or similar mark above it.

Endi Deswanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	16
2.1.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan	17
2.1.3 Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>)	18
2.1.3.1 Komite Audit (<i>Audit Committee</i>)	20
2.1.3.2 Dewan Pengawas Syariah (DPS)	21
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Pemikiran.	30
2.4 Pengembangan Hipotesis	32
2.4.1 Ukuran Komite Audit dan Kinerja Keuangan Bank Syariah	32

2.4.2	Pertemuan Komite Audit dan Kinerja Keuangan Bank Syariah...	33
2.4.3	Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Kinerja Keuangan Bank Syariah	34
2.4.4	Keahlian Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Kinerja Keuangan Bank Syariah	35
2.4.5	Pertemuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Kinerja Keuangan Bank Syariah	36
2.4.6	Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Kinerja Keuangan Bank Syariah.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		38
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	38
3.1.1	Kinerja Keuangan Bank Syariah.....	38
3.1.1.1	Menghitung <i>Return on Asset (ROA)</i>	39
3.1.2	Ukuran Komite Audit.....	39
3.1.3	Pertemuan Komite Audit.....	40
3.1.4	Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS)	40
3.1.5	Keahlian Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	41
3.1.6	Pertemuan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	41
3.1.7	Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS)	42
3.1.8	Ukuran Bank (<i>Size</i>)	43
3.1.9	Usia Bank (<i>Age</i>)	43
3.2	Populasi dan Sampel	43
3.3	Jenis dan Sumber Data	44
3.4	Metode Pengumpulan Data	44
3.5	Metode Analisis	44
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	45
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	45
3.5.2.1	Uji Normalitas	45
3.5.2.2	Uji Multikolinearitas	46
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	46
3.5.2.4	Uji Autokorelasi	47
3.5.3	Analisis Regresi	48
3.5.4	Pengujian Hipotesis.....	49

3.5.4.1 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)	49
3.5.4.2 Koefisien Determinasi.....	50
3.5.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T) .	50
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	51
4.1 Deskripsi dan Objek Penelitian	51
4.2 Analisis Data	52
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	52
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	59
4.2.2.1 Uji Normalitas	59
4.2.2.2 Uji Multikolonieritas	60
4.2.2.3 Uji Heteroskedestisitas	61
4.2.2.4 Uji Autokorelasi	62
4.2.3 Hasil Uji Hipotesis	63
4.2.3.1 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)	63
4.2.3.2 Koefisien Determinasi	64
4.2.3.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T) ...	65
4.2.3.3.1 Variabel Independen	66
4.2.3.3.2 Variabel Kontrol	68
4.3 Interpretasi Hasil	69
4.3.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.....	70
4.3.2 Pengaruh Pertemuan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.....	72
4.3.3 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.....	74
4.3.4 Pengaruh Keahlian Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.....	75
4.3.5 Pengaruh Pertemuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.....	76
4.3.6 Pengaruh Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.....	78

BAB V PENUTUP.....	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Keterbatasan.....	82
5.3 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1	Penilaian Uji Autokorelasi	47
Tabel 4.1	Populasi dan Sampel	51
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif.....	53
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas dengan <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	59
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolonieritas.....	60
Tabel 4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas	61
Tabel 4.6	Hasil Uji Autokorelasi.....	62
Tabel 4.7	Nilai Durbin Watson	62
Tabel 4.8	Hasil Uji Statistik F	63
Tabel 4.9	Koefisien Determinasi.....	64
Tabel 4.10	Hasil Uji Statistik T.....	65
Tabel 4.11	Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Definisi CG dari beberapa sudut pandang.....	18
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Daftar Sampel Penelitian	89
LAMPIRAN B Hasil Analisis SPSS Regresi Linear Berganda.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Praktik tata kelola perusahaan berkaitan erat dengan hubungan antar pemangku kepentingan. Organisasi pengembangan ekonomi menjelaskan mengenai *Corporate Governance* (CG) yang merupakan hubungan antara manajemen suatu perusahaan dengan pemegang saham (OECD, 2015). Menurut Daniri (2014) dalam implementasi CG terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi antara lain : independensi (*independency*), akuntabilitas (*accountability*) transparansi (*transparency*), tanggung jawab (*responsibility*), kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*).

Pendekatan teoritis utama yang menjelaskan mengenai hubungan CG dengan kinerja keuangan adalah *agency theory* (Nguyen *et. Al*, 2014). Dalam konsepsi teori ini dijelaskan bahwa perilaku manajerial perbankan bergantung pada struktur CG (Mollah *et. Al*, 2017). Perusahaan yang mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dipercaya dapat melindungi kepentingan pemegang saham, meminimalkan masalah keagenan dan dapat mencapai kinerja perusahaan yang unggul. Menurut Bukair & Abdul Rahman (2015) dalam perbankan syariah tidak hanya melihat pencapaian keuntungan atau kekayaan akan tetapi juga

menghormati aspek etika dan hukum yang mengatur mengenai keuangan syariah. Penelitian terdahulu lebih banyak menjelaskan mengenai konsep CG di perbankan secara umum atau konvensional dibandingkan dengan bank syariah, penyebabnya yaitu kurangnya informasi mengenai konsep CG dan langkah-langkah bank syariah dalam menjamin kesejahteraan para *stakeholder*.

Sebagian besar literatur yang ada membahas mengenai perbedaan dalam memahami konsep CG antara negara-negara barat dengan negara islam. Menurut Hasan (2009) ditinjau dari perspektif islam, konsep CG pada perbankan syariah memiliki kesamaan dengan perbankan konvensional yang mendefinisikan CG sebagai suatu sistem yang mengontrol perusahaan dengan tujuan untuk melindungi semua hak *stakeholder*. Sebaliknya menurut Bukhari *et. Al* (2013) mendefinisikan bahwa CG di bank syariah memiliki karakteristik yang unik yang membedakan dengan bank konvensional dengan menambahkan aturan islam pada *stakeholder* dalam model CG. Setuju dengan pendapat tersebut Magalhães & Al-Saad (2013) menjelaskan bahwa kerangka kerja CG bergantung pada pengembangan sistem hukum, regulasi, dan lingkungan kelembagaan. CG pada bank syariah dipandang sebagai suatu konsep yang berbeda dari bank konvensional. Selanjutnya Magalhães & Al-Saad (2013) mengamati bahwa tantangan bagi penerapan CG pada bank syariah adalah kepercayaan diri para *stakeholder* terhadap lembaga keuangan syariah sebagai penyedia jasa keuangan yang efisien, stabil dan dapat dipercaya serta sesuai dengan aturan atau hukum yang mengatur mengenai keuangan syariah.

Penelitian empiris yang meneliti mengenai dampak CG pada kinerja bank syariah di berbagai negara masih minim. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh

Ghayad (2008) menjelaskan mengenai pengaruh CG terhadap kinerja bank syariah di Bahrain hanya menggunakan satu mekanisme CG yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sheikh & Kareem (2015) menjelaskan mengenai pengaruh struktur dewan, konsentrasi kepemilikan, dan remunerasi CEO terhadap kinerja perbankan syariah di Pakistan. Penilaian kinerja perusahaan penting untuk dilakukan karena berkaitan dengan pengambilan keputusan. Pengukuran kinerja keuangan yang sering digunakan dalam kaitannya dengan CG adalah *Return On Equity (ROE)*, *Return On Asset (ROA)*, *Tobin's* (Renders *et. Al* 2010 ; Larcker *et. Al* 2007). Akan tetapi, dalam penelitian ini pengukuran terhadap kinerja keuangan perusahaan lebih menekankan pada penggunaan *Return on Asset (ROA)* serta melihat pengaruh mekanisme CG pada perbankan syariah.

Studi empiris yang berhubungan antara CG dan kinerja keuangan beragam. Beberapa penelitian telah membuktikan kualitas CG berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Ammann *et. Al*, 2011; Brown & Caylor, 2006 ; Black. *et. Al*, 2006). Namun, Cheung *et. Al* (2008) dan Price *et. Al* (2011) menjelaskan bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak dipengaruhi oleh kualitas CG. Markonah *et. Al* (2016) mengungkapkan bahwa ROA memiliki pengaruh positif terhadap CG sedangkan ROE berpengaruh negatif terhadap CG.

Variabel dalam penelitian ini yang berkaitan dengan mekanisme CG salah satunya adalah komite audit (*audit committee*). Menurut peraturan Bapepam LK (Sekarang OJK) Nomor IX 1.5 menjelaskan mengenai komite audit yang merupakan kewajiban yang harus ada pada setiap perusahaan publik. Demikian

peraturan dari Bank Indonesia (Sekarang OJK) Nomor 8/4/PBI/2006 mengenai tata kelola perbankan. Komite Audit mempunyai peran utama yaitu menjamin dan memastikan kualitas laporan keuangan yang diungkapkan (Wild, 1996). Komite audit dapat diukur dengan menggunakan tiga variabel fungsi yaitu : Jumlah anggota, independensi, dan frekuensi pertemuan. Bukti empiris mengenai hubungan antara karakteristik komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan beragam. Chan & Li (2008) menemukan bukti bahwa kehadiran direktur independen yang ahli dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya, Hsu & Petchsakulwong (2010) menemukan bahwa ukuran komite dan frekuensi pertemuan berhubungan negatif terhadap efisiensi pendapatan. Selanjutnya, Brown & Caylor (2006) mengungkapkan bahwa independensi komite audit atau ukurannya tidak memiliki keterkaitan dengan kinerja operasi. Penelitian oleh Ajili & Bouri (2018) juga mengungkapkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya menurut Manik (2011) komite audit sebagai bagian dari struktur CG, yang pada prakteknya dapat meminimalisir terjadinya *fraud* pada laporan keuangan perusahaan dengan menjunjung prinsip GCG. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Linda (2012) menjelaskan bahwa keberadaan komite audit dengan melakukan *monitoring* terhadap perusahaan dapat meminimumkan biaya agensi (*agency cost*) sehingga dapat mencapai efisiensi dan peningkatan terhadap kinerja keuangan. Pertemuan komite audit merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Menurut Karamanou & Vafeas (2005) pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dengan melakukan

pertemuan dapat lebih efisien mengurangi kesalahan dalam pelaporan keuangan. Setuju dengan penelitian tersebut Yin *et. Al* (2012) menjelaskan bahwa pertemuan komite audit yang sering dilakukan sepanjang tahun memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mengevaluasi isu-isu terkini perusahaan terkait dengan pelaporan keuangan. Penelitian mengenai pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan lebih banyak difokuskan pada perusahaan secara umum, penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas topik tersebut dan menjelaskan mengenai komite audit dan kinerja bank dengan fokus pada perbankan syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan mekanisme CG yang paling membedakan antara perbankan secara umum dengan perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kewajiban yaitu memastikan kepatuhan transaksi dan operasi terhadap aturan-aturan yang berlaku mengenai keuangan syariah (IFL). Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga mempunyai tugas khusus yaitu menangani mengenai yurisprudensi pada bank syariah dan memiliki keahlian dalam keuangan syariah (AAOFI, 2010). Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki 3 (tiga) peran utama yaitu konsultasi, pengendalian dan memastikan kehalalan produk. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting terhadap kontrol internal perusahaan yang memiliki tugas meninjau dan mengawasi kegiatan bank syariah (Darmadi, 2013).

Peran yang paling penting dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip hukum yang mengatur mengenai keuangan syariah (ILF) (Hamza, 2013). Karenanya, setiap Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengeluarkan laporan tahunan yang menyatakan

pendapatnya tentang kepatuhan transaksi dengan IFL. Laporan yang dikeluarkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyatakan bahwa apabila bank melanggar hukum, maka bank syariah dengan cepat akan kehilangan kepercayaan para investor dan kliennya dan hal ini dapat mengakibatkan penurunan terhadap kinerja perusahaan (Grassa, 2013).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dipercaya dapat mendorong kinerja bank syariah apabila mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Selain itu, Grassa (2013) berpendapat bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai kinerja yang tidak efisien dapat meningkatkan resiko ketidakpatuhan terhadap IFL. Ketidakpatuhan tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja bank syariah dan dapat kehilangan kepercayaan dari para *stakeholder*. Studi empiris yang dilakukan oleh Mollah & Zaman (2015) menjelaskan bahwa DPS dapat memainkan peran pengawasan atau peran penasehat. Kinerja perbankan syariah dipengaruhi secara positif apabila DPS memainkan peran sebagai pengawas, sedangkan berpengaruh negatif apabila memainkan peran penasehat.

Penelitian yang dilakukan oleh Mollah & Zaman (2015) juga menemukan bahwa adanya kesenjangan dalam literatur ketika memeriksa pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kinerja keuangan. Karenanya, dapat diasumsikan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah salah satu mekanisme CG di bank syariah yang dapat meningkatkan stabilitas dan konsekuensi dari profitabilitas lembaga keuangan syariah serta kinerja keuangan apabila menjalankan prinsip GCG. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki setidaknya minimal 3 (tiga) anggota yang mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai

masalah dalam ekonomi syariah (AAOFI, 2010). Menurut Khoirudin (2013) semakin banyak jumlah anggota DPS maka tingkat pengungkapan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga semakin tinggi sehingga kinerja bank syariah dapat meningkat. Selain ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS), Chariri (2012) mengungkapkan bahwa frekuensi pertemuan DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan kinerja sosial (CSR) perusahaan. Berbeda dengan peneliti sebelumnya Purwanti (2015) menemukan fakta bahwa frekuensi pertemuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak berpengaruh pada pengungkapan aspek produk atau pun jasa berdasarkan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Variabel yang terkait dengan mekanisme CG selanjutnya adalah remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Remunerasi DPS juga dapat memainkan peran dalam mempengaruhi kinerja perusahaan. Anggota DPS adalah salah satu input komersial dalam lembaga keuangan syariah yang memenuhi syarat untuk menerima remunerasi yang sesuai dengan pekerjaan mereka (Al Qari, 2002). Beberapa studi merekomendasikan bahwa pemegang saham menyetujui remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan rekomendasi direksi (AAOFI, 2008; Al Nashmi, 2002; Bakr, 2001). Menurut Al Qari (2002) remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus di ungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan agar lebih transparan dan akuntabel serta untuk menghindari konflik antar *stakeholder*.

Literatur yang ada mengenai pengaruh remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kinerja keuangan perusahaan masih sangat minim dan lebih banyak di dominasi oleh remunerasi CEO atau pun direksi. Penelitian yang dilakukan oleh Main *et. Al* (1996) menjelaskan bahwa remunerasi dewan

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini juga di dukung oleh Conyon & Schwalbach (2000) menggunakan data di Inggris dan Jerman, Kato & Kubo (2006) (2006) menggunakan data di Jepang, Merhebi *et. Al* (2006) di Australia dan Lee & Isa (2015) di Malaysia menemukan fakta bahwa remunerasi CEO berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya, menurut Sheikh dan Kareem (2015) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak dipengaruhi oleh remunerasi CEO. Berbeda dengan Brick *et. Al* (2006) menemukan fakta bahwa remunerasi CEO memiliki pengaruh negatif terhadap terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan, Conyon & Murphy (2007) di Inggris dan Zhou (2000) di Kanada hanya menemukan hubungan yang lemah antara remunerasi eksekutif dengan kinerja perusahaan.

Pertumbuhan terhadap kualitas dan kuantitas bank syariah di seluruh dunia terutama di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan *Global Islamic Financial Report* (GIFR, 2019) bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 1 (satu) lembaga keuangan syariah terbaik diatas Malaysia, Iran, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait yang sebelumnya tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat ke 6 (enam) dibawah negara-negara tersebut. Peningkatan keuangan syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari peran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang terus meningkatkan kualitas keuangan syariah seperti penggunaan *Financial Technology (Fintech)* syariah, *green* sukuk, dan juga dukungan pemerintah dengan mengeluarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.

Perbankan syariah saat ini menghadirkan diri sebagai pesaing serius konvensional, bahkan di Indonesia adanya bank konvensional yang melakukan *split-off* dengan mengubah diri dari bank konvensional menjadi bank syariah. Adanya kontroversi antar peneliti yang menganggap bahwa CG pada perbankan syariah tidak memiliki perbedaan dengan perbankan secara umum. Selain itu ditemukan adanya inkonsistensi antar peneliti. Menurut Ajili & Bouri (2018) menyatakan bahwa CG pada perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank pada umumnya, meskipun pun CG pada perbankan syariah saat ini masih sulit dipahami dan penilaian kualitasnya perlu diselidiki lebih dalam. Karenanya, penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas penelitian sebelumnya mengenai mekanisme CG pada bank syariah serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini melanjutkan penelitian dari Ajili & Bouri (2018) yang meneliti mengenai kualitas CG terhadap peningkatan kinerja keuangan perbankan syariah di negara GCC yaitu : Oman, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Kerajaan Arab Saudi dan Bahrain. Peneliti menggunakan mekanisme CG berupa komite audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Peneliti menggunakan pengukuran yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan menggunakan sampel di Indonesia dan Malaysia. Selain itu, peneliti juga menambahkan variabel remunerasi DPS. Penelitian ini merupakan upaya untuk berkontribusi pada literatur yang ada mengenai mekanisme CG pada perbankan syariah serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Agency Theory merupakan teori utama yang menjelaskan mengenai pengaruh efektifitas CG terhadap kinerja keuangan (Nguyen *et. Al*, 2014). Penelitian terdahulu mencoba membuktikan hubungan antara mekanisme CG dengan kinerja perusahaan. Studi Empiris yang dilakukan oleh Ammann *et. Al* (2011), Black *et. Al* (2006), Brown & Caylor (2006) menemukan fakta bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi oleh mekanisme CG. Sebaliknya, Ajili & Bouri (2018), Cheung *et. Al* (2008) dan Price *et. Al* (2011) menemukan bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak dipengaruhi oleh mekanisme CG. Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya konsistensi dari hasil penelitian tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran komite audit mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah?
2. Apakah pertemuan komite audit mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah?
3. Apakah ukuran DPS mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah?
4. Apakah keahlian DPS mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah?
5. Apakah pertemuan DPS mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah?
6. Apakah remunerasi DPS mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka secara umum tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menguji dan menganalisis bukti empiris mengenai pengaruh ukuran komite audit terhadap kinerja keuangan bank syariah.
2. Menguji dan menganalisis bukti empiris mengenai pengaruh pertemuan komite audit terhadap kinerja keuangan bank syariah.
3. Menguji dan menganalisis bukti empiris mengenai DPS terhadap kinerja keuangan bank syariah.
4. Menguji dan menganalisis bukti empiris mengenai pengaruh keahlian DPS terhadap kinerja keuangan bank syariah.
5. Menguji dan menganalisis bukti empiris mengenai pengaruh pertemuan DPS terhadap kinerja keuangan bank syariah.
6. Menguji dan menganalisis bukti empiris mengenai pengaruh remunerasi DPS terhadap kinerja keuangan bank syariah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Secara Teoritis, kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memperluas hasil penelitian sebelumnya dengan menggunakan pengukuran yang berbeda mengenai pengaruh mekanisme CG terhadap kinerja keuangan bank syariah. Penelitian ini diharapkan dikemudian hari dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi peneliti lain yang sejenis yang ingin meneliti mengenai mekanisme CG pada bank syariah serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

2. Aspek Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak manajemen perbankan syariah dalam membuat sebuah keputusan atau pun merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan CG perusahaan. Mekanisme CG yang dimaksud seperti ukuran komite audit, pertemuan komite audit, ukuran DPS, keahlian DPS, frekuensi pertemuan DPS, dan remunerasi DPS.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 5 bab sebagai berikut : Bab I pendahuluan, bab II tinjauan pustaka, bab III metode penelitian, bab IV hasil penelitian dan pembahasan, Bab V yaitu penutup. Berikut ini penjelasan dari masing-masing bab dalam penelitian :

BAB I : PENDAHULUAN

Pokok bahasan yang dijelaskan dalam bab ini adalah tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pokok bahasan yang dijelaskan dalam bab ini adalah tentang landasan teori yang membahas mengenai penelitian terdahulu yang menjadi dasar rujukan dalam penulisan, selain itu bab ini juga menjelaskan mengenai kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pokok bahasan yang dijelaskan dalam bab ini adalah tentang persiapan dalam melakukan penelitian, seperti menjelaskan mengenai : variabel dalam penelitian dan definisi operasional masing-masing variabel, penentuan populasi dan sampel penelitian yang akan digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan juga menjelaskan mengenai metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pokok bahasan yang dijelaskan dalam bab ini adalah mengenai deskripsi dari objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pokok bahasan yang dijelaskan dalam bab ini yaitu mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian seterusnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam Sub bab menjelaskan mengenai landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian sebagai dasar dalam membangun logika dan juga pengembangan hipotesis penelitian. Penelitian ini menggunakan teori agensi (*agency theory*) dalam menjelaskan hubungan antar pemangku kepentingan.

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Pendekatan teoritis utama menjelaskan mengenai keterkaitan antara CG dan kinerja keuangan adalah *agency theory* (Nguyen *et. Al*, 2014). Teori agensi adalah teori yang menjelaskan mengenai manajemen perusahaan (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Dalam konsepsi teori ini dijelaskan mengenai perilaku oportunistik manajerial perbankan bergantung pada struktur CG (Mollah *et. Al*, 2017). Akibatnya, perusahaan yang mempunyai CG baik dapat melindungi kepentingan pemegang saham, meminimalkan masalah keagenan dan juga mencapai kinerja organisasi yang unggul. Hubungan antara *agent* dengan *principal* dalam hal ini pemilik (*principal*) mendelegasikan tugas dan wewenangnya untuk mengelola perusahaan kepada manajemen (*agent*). Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 teori agensi ini muncul karena adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara kepemilikan yang dikelola oleh direksi dan juga pengawasan dalam menjalankan perusahaan yang dilakukan oleh komisaris. Teori

agensi berusaha memecahkan dua permasalahan utama yaitu masalah keagenan dan pembagian risiko. Masalah keagenan (*agency problem*) muncul apabila terjadi perbedaan kepentingan antara *agent* dengan *principal* yang saling bertentangan dan mementingkan diri sendiri yang disebut *conflict of interest* (Jaeckle, 2010). Konflik kepentingan antara *agent* dengan *principal* ini melekat dalam hubungan keduanya yang diharapkan salah satu pihak bertindak demi kepentingan terbaik pihak lain (Fung, *et. Al*, 2009). Sedangkan masalah pembagian risiko muncul ketika adanya perbedaan sikap antara *agent* dengan *principal* mengenai risiko.

Permasalahan yang sering muncul yang disebabkan oleh *Conflict of Interest* atau perilaku yang saling bertentangan yaitu terdiri dari :

1. *Moral Hazard*, didefinisikan oleh Kreps (1990) sebagai tindakan yang dilakukan oleh pihak *agent* dalam sebuah transaksi yang dapat mempengaruhi pihak lain (*Principal*), dalam hal ini pihak *principal* tidak dapat mengawasi secara keseluruhan dari tindakan *agent* tersebut. Motif utama dari tindakan ini yaitu memperoleh keuntungan bagi pihak yang mempunyai kepentingan. Selain itu hal ini juga dijelaskan oleh Dobson (1993) yang menjelaskan bahwa *moral hazard* adalah tindakan *agent* yang dilakukan secara tidak jujur atau melanggar kontrak kepada *principal* dalam melakukan pemilihan alternatif yang menguntungkan diri sendiri. Menurut Brooks &Dunn (2012) menjelaskan bahwa *moral hazard* dapat terjadi disebabkan oleh tindakan manajemen (direksi) yang tidak dapat diobservasi. Tindakan tersebut dilakukan atas kepentingan pribadi yang tentunya dapat merugikan pemegang saham (*principal*).

2. *Adverse Selection*, menurut Kreps (1990) menjelaskan bahwa *adverse selection* terjadi apabila salah satu pihak (*agent*) mengetahui informasi dari transaksi yang akan dilakukan secara relevan sedangkan pihak kedua (*principal*) tidak mengetahui terjadinya asimetri informasi (*asymmetrical information*). Sehingga salah satu pihak atau keduanya dapat melakukan kesalahan ketika mengambil keputusan. Hal ini dapat terjadi pada saat sebelum terjadinya kontrak (*pre-contracting information*) atau setelah terjadinya kontrak (Dobson, 1993).

Teori agensi (*Agency theory*) lebih menekankan pada pemilik saham dan juga pemilik organisasi, untuk mengatasi konflik yang terjadi antara *agent* dengan *principal* dibutuhkan peran pengawasan terhadap pengelolaan organisasi. Pemilik saham (*principal*) membutuhkan peran komisaris yang memiliki fungsi mengawasi perilaku manajer perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Karenanya untuk menciptakan kontrol yang efektif terhadap manajer dan juga untuk mengurangi konflik di antara pemangku kepentingan maka Fama & Jensen (2008) merekomendasikan pemisahan keputusan manajerial dari keputusan kontrol dan berpendapat bahwa direksi harus didominasi oleh direktur independen. Selain itu komite audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga mempunyai peran terhadap perusahaan. Peran utama komite audit adalah untuk menjamin kualitas pelaporan keuangan yang diungkapkan. Sedangkan peran utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran konsultasi, mengendalikan, dan memastikan.

Pengukuran terhadap kinerja keuangan perusahaan adalah suatu cara untuk melihat kinerja manajemen perusahaan apakah telah sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Oleh karenanya hal tersebut dapat dilihat dari efektivitas CG

perusahaan. Perusahaan yang mempunyai kualitas CG yang baik dianggap dapat melindungi kepentingan pemegang saham, meminimalkan masalah keagenan dan untuk mencapai kinerja perusahaan yang unggul.

2.1.2 Pengukuran kinerja keuangan perusahaan

Dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan terdapat banyak metode yang dapat digunakan. Pengukuran kinerja keuangan yang sering digunakan dalam kaitannya dengan CG adalah *Return on Equity* (ROE), *Return on Asset* (ROA), *Tobin's* (Renders *et. Al* 2010 ; Larcker *et. Al* 2007). Penelitian sebelumnya mendefinisikan kinerja keuangan perusahaan secara beragam. Menurut Fischer & Sawczyn (2013) kinerja keuangan merupakan kemampuan keuangan perusahaan atau sejauh mana perusahaan tersebut mencapai tujuan ekonominya. Sedangkan menurut Lyon (2007) kinerja keuangan terutama profitabilitas merupakan aspek penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan keberlangsungan perusahaan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya Cochran & Wood (1984) menjelaskan mengenai pengukuran kinerja keuangan yang paling mendasar yaitu tingkat *return* investor yang diukur dari perspektif *shareholder*. Hal ini mencerminkan bahwa *shareholder* merupakan kelompok *stakeholder* utama yang kepuasaannya menentukan keberlangsungan perusahaan. Penelitian ini mengukur kinerja keuangan bank syariah lebih menekankan pada penggunaan *Return on Asset* (ROA). Penelitian ini tidak menggunakan rasio *Tobin's* sebagai ukuran kinerja bank karena tidak semua bank syariah yang ada dalam sampel ini terdaftar di bursa saham.

2.1.3 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Praktik CG berkaitan erat dengan hubungan antar pemangku kepentingan.

Daniri (2014) berpendapat mengenai definisi *Corporate Governance* antara lain :

1. Subjek, yaitu inti atau bahasan utama CG.
2. Objek, yaitu siapa yang menjadi sasaran dalam penerapan CG.
3. Fungsi, yaitu tugas utama yang harus dijalankan.
4. Fokus, yaitu tujuan diterapkannya CG.
5. Sasaran, yaitu target yang ingin dicapai.

Gambar 2.1 Definisi CG dari beberapa sudut pandang.

Kriteria	Komite Cadbury	CEPS	OECD	Indonesia
Subjek	Prinsip	Sistem	Cara	Cara
Objek	Perusahaan	Manajemen perusahaan	Manajemen perusahaan	Organ perusahaan
Fungsi	Mengarahkan dan mengendalikan	Membentuk sistem	Mengambil keputusan	Menciptakan nilai tambah
Fokus	a. Keseimbangan kekuatan dan kewenangan b. Pertanggungjawaban	Hak, proses pengendalian	Pertanggungjawaan	Pola hubungan, proses, dan sistem
Sasaran	<i>Stakeholder</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Shareholder</i>	<i>Stakeholder</i>
CEPS : <i>Center for European Policy Studies</i>				
OECD : <i>Organization for Economic Cooperation and Development.</i>				
Daniri (2014)				

Organisasi pengembangan ekonomi menjelaskan mengenai *Corporate Governance* (CG) yang merupakan hubungan antara manajemen suatu perusahaan dengan para *shareholder* (OECD, 2015). GCG merupakan salah satu bentuk

penerapan bisnis yang beretika karena menekankan pada transparansi serta akuntabilitas perusahaan. Penerapan CG yang baik dipercayai dapat melindungi kepentingan pemegang saham. Daniri (2014) menjelaskan mengenai lima prinsip dasar GCG yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Konsep transparansi merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yang terjadi dalam *agency theory*. Selain itu dengan adanya transparansi juga dapat mencegah terjadinya *moral hazard* dan *adverse selection*.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas berkaitan dengan wewenang dalam pengambilan keputusan, perusahaan memiliki kewajiban serta bertanggungjawab atas keputusan yang dibuatnya. Oleh karenanya perusahaan harus menerapkan tata kelola yang baik yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan perusahaan serta kepentingan *stakeholder*.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Berbeda dengan akuntabilitas yang lebih menekankan pada situasi atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sedangkan responsibilitas lebih menekankan pada sikap dan perilaku yang bertanggungjawab. Perusahaan dalam menetapkan kebijakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan untuk keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Selain itu perusahaan juga harus taat dan patuh (*compliance*) terhadap aturan yang berlaku.

4. Independensi (*Independency*)

Independensi memiliki makna dimana perusahaan tidak memihak kepada siapa pun atau bersikap independen serta menghindari campur tangan dari pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip GCG yang terakhir menekankan mengenai kewajaran dan kesetaraan dimana perusahaan harus mementingkan kepentingan para *stakeholder* dan tidak menyembunyikan informasi antar *stakeholder* satu dengan yang lainnya.

2.1.3.1 Komite Audit (*Audit Committee*)

Menurut peraturan Bapepam LK (Sekarang OJK) Nomor IX 1.5 menjelaskan mengenai komite audit yang merupakan kewajiban yang harus ada pada setiap perusahaan publik. Demikian peraturan dari Bank Indonesia (Sekarang OJK) Nomor 8/4/PBI/2006 mengenai tata kelola perbankan. Komite audit mempunyai peran utama yaitu menjamin dan memastikan kualitas laporan keuangan yang diungkapkan (Wild, 1996). Komite audit dapat diukur dengan menggunakan tiga variabel fungsi yaitu : Jumlah anggota, independensi, dan frekuensi pertemuan. Selain itu *Sarbanes Oxley Act* (SOA) juga menjelaskan salah satu bentuk reformasi CG yaitu penguatan komite audit. SOA memberikan wewenang yang luas kepada komite audit untuk mengawasi perusahaan terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan. Tugas komite audit juga dijelaskan berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Sekarang OJK) Nomor IX.I.5 yang menjelaskan bahwa komite audit memiliki

tugas memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini disampaikan kepada publik setiap tiga bulan sekali. Komite audit melakukan penelaahan untuk memastikan laporan keuangan yang disampaikan ke publik telah sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor VIII.G-II, sebagai berikut :

1. Laporan keuangan yang disajikan kepada publik sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.
2. Laporan keuangan telah menyajikan informasi keuangan secara lengkap, tidak mengandung kesalahan materil serta tidak menghilangkan informasi penting lainnya.

Komite audit sebagai bagian dari struktur CG yang pada prakteknya dapat meminimalisir terjadinya *fraud* pada laporan keuangan perusahaan dengan menjunjung prinsip GCG. Semakin banyak jumlah komite audit maka akan berdampak pada monitoring yang dilakukan serta kualitas dari pelaporan keuangan.

2.1.3.2 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Mekanisme CG yang membedakan antara perbankan syariah dengan perbankan pada umumnya yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ada 3 (tiga) peran utama dari DPS yaitu konsultasi, pengendalian dan memastikan. Peran utama termasuk sertifikasi instrumen keuangan yang diizinkan dan penjelasan mengenai cara menghitung zakat (Alnasser & Muhammed, 2012). Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga memainkan peran penting terhadap kontrol internal perusahaan yang memiliki tugas meninjau dan mengawasi kegiatan

bank syariah (Darmadi, 2013). Peran yang paling penting dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah memastikan kepatuhan terhadap prinsip hukum yang mengatur mengenai keuangan syariah (ILF) (Hamza, 2013). Karenanya, setiap Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengeluarkan laporan tahunan yang menyatakan pendapatnya tentang kepatuhan transaksi dengan IFL. Apabila laporan yang dikeluarkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyatakan bahwa bank melanggar hukum, maka bank syariah dengan cepat akan kehilangan kepercayaan para investor dan kliennya dan hal ini dapat mengakibatkan penurunan terhadap kinerja perusahaan (Grassa, 2013).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dipercaya dapat mendorong kinerja bank syariah apabila mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Selain itu, Grassa (2013) berpendapat bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai kinerja yang tidak efisien dapat meningkatkan resiko ketidakpatuhan terhadap IFL. Ketidakpatuhan tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja bank syariah dan dapat kehilangan kepercayaan dari pada *stakeholder*. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah salah satu mekanisme CG di bank syariah yang dapat meningkatkan stabilitas dan konsekuensi dari profitabilitas lembaga keuangan syariah serta kinerja keuangan apabila menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan *Return on Assets* (ROA) untuk mengukur variabel dependen berupa kinerja keuangan perusahaan, serta variabel ukuran komite audit, pertemuan komite audit, ukuran DPS, keahlian DPS, pertemuan DPS,

remunerasi DPS. Penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai kinerja keuangan dan kualitas CG sangat beragam serta terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya.

Studi empiris yang dilakukan oleh Ajili dan Bouri, (2018) bertujuan untuk mengukur kualitas *Corporate Governance* (CG) pada bank syariah dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan diukur dengan *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Assets* (ROA). Sampel penelitian pada 44 bank syariah yang terdapat di negara Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman, Bahrain dan Kerajaan Arab Saudi selama periode 2010-2014. Variabel dependen yaitu kinerja keuangan (*financial performance*) bank syariah. Sedangkan variabel independen yaitu kualitas CG yang memiliki sub-indeks : efektivitas BOD (*Board Of Directors*), efektivitas AC (*Audit Committe*), efektivitas SSB (*Shariah Supervisory Board*). Variabel kontrol yaitu : ukuran (*size*), umur (*age*), rasio utang (*leverage*). Secara statistik hasil menunjukkan bahwa ROA dan ROE tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kualitas CG dari masing-masing sub-indeks, sedangkan variabel kontrol (*size*) secara signifikan mempengaruhi ROA dan ROE, Variabel *age* tidak memiliki hubungan yang signifikan, dan *leverage* berhubungan negatif terhadap ROA dan ROE.

Studi empiris yang dilakukan oleh Mollah.*et. Al* (2017) bertujuan untuk melihat perbedaan struktur *Corporate Governance* (CG) yang mempengaruhi pengambilan risiko dan membandingkan kinerja bank syariah dengan bank konvensional. Pengambilan risiko (*Risk Taking*) diukur dengan *log_z* atau melihat *z-score* sedangkan *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur kinerja

keuangan perusahaan. Sampel penelitian ini terdiri dari 52 bank syariah dan 104 bank konvensional yang terdapat di 14 negara selama periode 2005-2013. Pengambilan risiko (*Risk Taking*) dan kinerja keuangan (*financial performance*) digunakan sebagai variabel dependen, sedangkan *Corporate Governance Index* (CGI) pada bank syariah dan konvensional sebagai variabel. Secara statistik CGI pada perbankan syariah secara signifikan lebih baik dari pada perbankan pada umumnya, *z-score* mempunyai hubungan positif lebih baik dibandingkan bank konvensional, dan struktur *governance* pada bank syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Studi empiris yang dilakukan oleh Markonah *et. Al* (2016) bertujuan untuk mengukur kinerja sektor perbankan dengan implementasi GCG. *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kinerja perbankan, sedangkan GCG diukur dengan menggunakan *FCGI Index*. Sampel penelitian yaitu perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. GCG digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian. Sedangkan ROE, ROA, komposisi aset, dan ukuran perusahaan (*size*) digunakan sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa ROE dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap GCG. Sedangkan ROA dan komposisi aset berpengaruh positif terhadap GCG perusahaan.

Studi empiris yang dilakukan oleh Mersni & Ben Othman (2016) bertujuan untuk memeriksa apakah mekanisme *Corporate Governance* (CG) mempengaruhi ketentuan pelaporan kerugian pinjaman yang dilaporkan oleh manajer di bank syariah. Sampel penelitian berupa 20 perbankan syariah di 7 (Tujuh) negara Timur

Tengah periode 2007-2011. *Discretionary Loan Loss Provisions* (DLLP) atau ketentuan pelaporan kerugian pinjaman digunakan sebagai variabel dependen. Sedangkan ukuran dewan (*BOD-Size*), komite.audit (*audit committe*), ukuran Dewan Pengawas Syariah (*SSB-Size*), komite audit syariah (*ext-sharia audit committe*) digunakan sebagai variabel independen. Secara statistik DLLP berhubungan negatif dengan ukuran dewan dan keberadaan komite audit. Sedangkan DLLP berhubungan positif dengan ukuran dewan syariah. Hal ini menunjukkan ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kecil lebih efektif dari pada yang berukuran besar. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai pengetahuan akuntansi mengurangi perilaku diskresioner.

Studi empiris yang dilakukan oleh Sheikh & Kareem (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur dewan berupa ukuran dewan dan komposisi dewan, konsentrasi kepemilikan, dan remunerasi CEO pada bank syariah. ROA dan ROE untuk mengukur kinerja perusahaan, sedangkan ukuran dewan diukur dengan log, komposisi dewan diukur dengan direktur non-eksekutif terhadap total anggota direktur, konsentrasi kepemilikan diukur dengan 5 sampai 10 pemegang saham mayoritas terhadap total saham biasa, dan remunerasi CEO diukur dengan remunerasi CEO terhadap total laba perusahaan. Sampel penelitian yaitu perbankan syariah yang terdapat di Pakistan periode 2004-2014. ROA dan ROE digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian. Sedangkan variabel independen yaitu ukuran dewan, komposisi dewan, konsentrasi kepemilikan, dan remunerasi CEO pada bank syariah. Variabel kontrol yaitu ukuran bank (*size*). Secara statistik hasil

penelitian menunjukkan bahwa ROA dipengaruhi oleh komposisi dewan sedangkan ROE tidak dipengaruhi. Konsentrasi kepemilikan dan remunerasi CEO memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROA dan ROE. Sedangkan variabel ukuran bank berpengaruh signifikan positif terhadap ROA dan ROE. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan hanya dipengaruhi oleh ukuran dewan.

Studi empiris yang dilakukan oleh Kartika (2014) dilakukan untuk melihat pengaruh penerapan GCG pada perbankan syariah di Indonesia. *Profitabilitas* atau *Net Profit Margin* digunakan untuk mengukur kinerja perbankan sekaligus menjadi variabel dependen dalam penelitian sedangkan Dewan Pengawas Syariah (DPS), direksi, komite-komite, dewan komisaris sebagai variabel independen. Sampel penelitian yaitu 7 perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2010-2013. Secara statistik hasil menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak dipengaruhi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan dewan komisaris. Sedangkan yang mempengaruhi kinerja perbankan yaitu variabel komite-komite dan dewan direksi.

Studi empiris yang dilakukan oleh Ammann *et. Al* (2011) memiliki tujuan untuk menyelidiki pengaruh tingkat CG terhadap *firm value* dengan menggunakan data sebelumnya yang tidak digunakan oleh *Governance Metrics International* (GMI). Tingkat CG diukur dengan menggunakan 64 atribut dengan 3 (tiga) alternatif *Corporate Governance Indices* (CGI). Nilai perusahaan (*firm value*) diukur dengan *Tobin's Q*. Sampel penelitian yaitu terdapat 6.663 perusahaan dari 22 negara maju periode 2003-2007. Nilai perusahaan (*firm value*) digunakan sebagai variabel dependen, sedangkan *firm-level Corporate Governance* atau tingkat CG perusahaan sebagai variabel independen. Secara statistik hasil penelitian

menunjukkan bahwa tingkat CG perusahaan yang diwakili oleh ketiga indeks berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan (*firm value*). Selain itu atribut CG yang dikontrol menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.

Studi empiris yang dilakukan oleh Megasari (2010) bertujuan untuk menguji pengaruh komite audit dan DPS terhadap GCG perusahaan. Sampel penelitian terdapat 3 perbankan syariah yaitu : Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah periode 2010. Variabel dependen yaitu GCG yang diukur dengan menggunakan mekanisme GCG. Sedangkan variabel independen yaitu komite audit dan DPS. Secara statistik hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG dipengaruhi oleh variabel komite audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti. (Tahun)	Variabel	Hasil
1.	Ajili & Bouri (2018)	- Variabel dependen : Kinerja keuangan Bank Syariah. - Variabel independen : <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas CG • Efektivitas BOD • Efektivitas AC • Efektivitas SSB - Variabel Kontrol : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Size</i> • <i>Age</i> • <i>Leverage</i> 	Secara statistik tidak ditemukan hubungan yang signifikan dari masing-masing sub-indeks CG terhadap ROA dan ROE, sedangkan variabel kontrol (<i>size</i>) secara signifikan mempengaruhi ROA dan ROE, Variabel kontrol (<i>age</i>) tidak berpengaruh signifikan, dan variabel kontrol (<i>leverage</i>)

			berpengaruh negatif terhadap ROA dan ROE.
2.	Mollah <i>et. Al</i> (2017)	<p>- Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Risk Taking</i> • Kinerja Keuangan <p>- Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Corporae Governance Index (CGI)</i> pada Bank Konvensional • <i>Corporae Governance Index (CGI)</i> pada Bank Syariah 	Secara statistik menunjukkan bahwa CGI pada bank syariah secara signifikan lebih baik dibandingkan bank konvensional, <i>z-score</i> mempunyai hubungan positif lebih baik dibandingkan perbankan secara umum, dan struktur CG pada perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
3.	Markonah <i>et. Al</i> (2016)	<p>- Variabel dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> <p>- Variabel independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROE • ROA • Komposisi aset • Ukuran (<i>size</i>) 	Hasil penelitian ini secara statistik menunjukkan bahwa ROE dan ukuran perusahaan (<i>size</i>) berpengaruh signifikan negatif terhadap GCG. Sedangkan ROA dan komposisi aset memiliki pengaruh positif terhadap GCG perusahaan.
4.	Mersni & Ben Othman (2016)	<p>- Variabel dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Discretionary Loan Loss Provisions (DLLP)</i> <p>- Variabel independen :</p>	Secara statistik hasil penelitian menunjukkan bahwa DLLP berpengaruh negative terhadap ukuran dewan dan keberadaan komite

		<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Dewan (<i>BOD-Size</i>) • Komite Audit (<i>Audit Committe</i>), • Ukuran Dewan Pengawas Syariah (<i>SSB-Size</i>) • Komite Audit Syariah Eksternal (<i>Ext-Sharia Audit Committe</i>). 	<p>audit. Sedangkan DLLP berhubungan positif dengan ukuran dewan syariah. Hal ini menunjukkan ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kecil lebih efektif dari pada yang berukuran besar. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai pengetahuan akuntansi mengurangi perilaku diskresioner.</p>
5.	Sheikh & Kareem (2015)	<p>- Variabel dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROE • ROA <p>- Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsentrasi kepemilikan • Komposisi dewan • Ukuran dewan • Remunerasi CEO <p>- Variabel kontrol :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran bank (<i>Bank Size</i>) 	<p>Secara statistic komposisi dewan berpengaruh positif terhadap ROA dan berhubungan negatif dengan ROE akan tetapi hubungannya tidak signifikan. Konsentrasi kepemilikan dan remunerasi CEO berpengaruh positif terhadap ROA dan ROE tetapi hubungannya tidak signifikan. Ukuran bank berpengaruh positif terhadap ROA dan ROE. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan hanya dipengaruhi oleh ukuran dewan.</p>
6.	Kartika (2014)	<p>- Variabel dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Profitabilitas</i> <p>- Variabel independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direksi 	<p>Secara statistik hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja perbankan tidak dipengaruhi oleh</p>

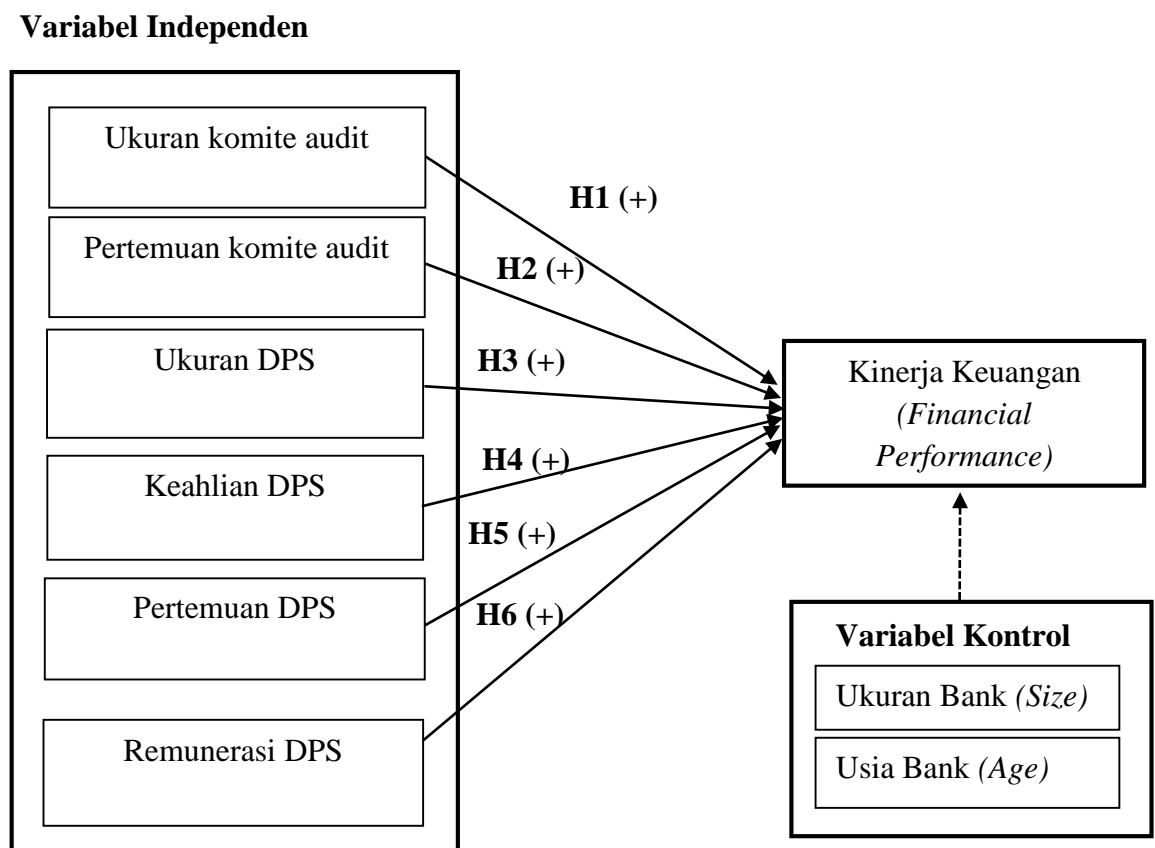
		<ul style="list-style-type: none"> • Komite-komite • DPS • Komisaris 	dewan komisaris dan Pengawas Syariah (DPS). Kinerja perbankan dipengaruhi oleh variabel komite-komite dan dewan direksi.
7.	Ammann <i>et. Al</i> (2011)	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel dependen : <ul style="list-style-type: none"> • Nilai perusahaan (<i>FirmValue</i>) - Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Firm-level Corporate Governance</i> 	Secara statistik hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat CG perusahaan yang diwakili oleh ketiga indeks berpengaruh kuat secara signifikan positif terhadap nilai perusahaan (<i>firm value</i>).
8.	Megasari (2010)	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel dependen : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Good Corporate Governance</i> - Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Komite audit dan DPS 	Secara statistik hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG dipengaruhi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan komite audit.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penjelasan mengenai penelitian terdahulu menyebutkan bahwa kinerja bank syariah sangat terkait dengan kualitas tata kelolanya. Semakin baik CG suatu perusahaan maka diyakini semakin baik kinerjanya. Organisasi pengembangan ekonomi menjelaskan mengenai *Corporate Governance* (CG) yang merupakan hubungan antara manajemen suatu perusahaan dengan para *stakeholder* (OECD, 2015). Hal ini dijelaskan dalam *agency theory* dimana pemegang saham mempunyai kepentingan terhadap perusahaan dengan mengharapkan laba yang maksimal. Oleh karena itu komite audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

mempunyai peran dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Mekanisme CG menjadi salah satu indikator kinerja bank syariah, mekanisme CG diukur dengan menggunakan beberapa variabel independen. Sedangkan kinerja bank syariah diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA). Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

Sub bab ini akan menjelaskan mengenai pengembangan hipotesis yang mengacu pada kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya. Hipotesis yang akan dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

2.4.1 Ukuran Komite Audit dan Kinerja Keuangan Bank Syariah

Menurut peraturan Bapepam LK (Sekarang OJK) Nomor IX 1.5 menjelaskan mengenai komite audit yang merupakan kewajiban yang harus ada pada setiap perusahaan publik. Demikian peraturan dari Bank Indonesia (Sekarang OJK) Nomor 8/4/PBI/2006 mengenai tata kelola perbankan. Komite Audit mempunyai peran utama yaitu menjamin dan memastikan kualitas laporan keuangan yang diungkapkan (Wild, 1996). Peraturan Bapepam Nomor IX.1.5 menjelaskan mengenai jumlah komite audit yaitu berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari komisaris independen dan pihak luar. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang diungkapkan serta melakukan tugas pengawasan terhadap informasi keuangan.

Studi empiris yang dilakukan oleh Manik (2011) menyatakan bahwa komite audit sebagai bagian dari struktur CG, yang pada prakteknya dapat meminimalisir terjadinya *fraud* pada laporan keuangan perusahaan dengan GCG. Studi empiris yang dilakukan oleh Linda (2012) menjelaskan bahwa keberadaan komite audit dengan melakukan *monitoring* terhadap perusahaan dapat meminimumkan biaya agensi (*agency cost*) sehingga dapat mencapai efisiensi dan peningkatan terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas topik tersebut dan

menjelaskan mengenai ukuran komite audit dan kinerja keuangan dengan fokus pada perbankan syariah. Dari ulasan penelitian di atas, maka hipotesis pertama sebagai berikut.

H1 :Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah

2.4.2 Pertemuan Komite Audit dan Kinerja Keuangan Bank Syariah

Menurut *agency theory* kualitas pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dapat mengurangi *agency cost* salah satunya adalah perilaku oportunistik yang dapat menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Pengawasan dapat dilakukan dengan adanya pertemuan anggota komite audit. Menurut Peraturan Bank Indonesia (Sekarang OJK) Nomor 8/4/PBI/2006 mengenai penerapan GCG dijelaskan mengenai komite audit yang harus melakukan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Komite audit mempunyai peran menjamin kualitas laporan keuangan (Wild, 1996).

Pertemuan komite audit merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Menurut Karamanou & Vafeas (2005) komite audit yang aktif melakukan pertemuan dapat menjalankan fungsi pengawasan lebih baik sehingga perusahaan dapat lebih efisien. Sependapat dengan penelitian tersebut Yin *et. Al* (2012) menjelaskan bahwa pertemuan komite audit yang lebih aktif sepanjang tahun memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mengevaluasi isu-isu terkini perusahaan terkait dengan pelaporan keuangan. Penelitian mengenai pertemuan komite audit lebih banyak difokuskan pada perusahaan secara umum dan masih sedikit yang meneliti mengenai pengaruh pertemuan komite audit

dengan kinerja keuangan bank syariah. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas topik tersebut dan menjelaskan mengenai pertemuan komite audit dan kinerja keuangan dengan fokus pada perbankan syariah. Dari ulasan penelitian di atas, maka hipotesis kedua sebagai berikut.

H2 : Pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah

2.4.3 Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Kinerja Keuangan Bank Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan mekanisme CG yang paling membedakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Ada 3 peran utama dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu konsultasi, pengendalian, memastikan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dipercaya dapat mendorong kinerja bank syariah dengan mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Studi empiris yang dilakukan oleh Mollah & Zaman (2015) menemukan bahwa DPS memainkan peran pengawasan atau peran penasehat.

Penelitian ini mengamati bahwa DPS memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank syariah ketika memainkan peran pengawasan sedangkan sebaliknya berdampak negatif ketika memainkan peran penasehat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki setidaknya minimal 3 (tiga) anggota yang mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai masalah dalam ekonomi syariah (AAOFI, 2010). Peningkatan kuantitas DPS sejalan dengan tingginya pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) bank syariah. Maka hipotesis ketiga sebagai berikut.

H3 : Ukuran DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah

2.4.4 Keahlian Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Kinerja Keuangan Bank Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugas pengawasan harus memastikan kegiatan operasional baik produk berupa barang atau pun jasa sesuai dengan prinsip syariah. Pemilihan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki keahlian dan kompetensi membutuhkan peran Dewan Syariah Nasional (DSN) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain ahli dalam hal fiqh muamalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga harus memiliki keahlian dalam bidang perbankan dan keuangan. Hal ini sejalan dengan aturan yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki setidaknya minimal 3 (tiga) anggota yang mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai masalah dalam perbankan syariah (AAOIFI, 2010).

Studi empiris yang dilakukan oleh Mollah & Zaman (2015) menjelaskan mengenai peran DPS yaitu memainkan peran pengawasan atau peran penasehat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan fiqh muamalah dipercaya dapat menjalankan pengawasan lebih baik. Penelitian sebelumnya yang pengaruh dari keahlian Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kinerja keuangan masih terbatas. Karenanya penelitian ini mencoba menemukan bukti empiris mengenai pengaruh keterkaitan antar variabel tersebut. Dari ulasan penelitian di atas, maka hipotesis keempat sebagai berikut.

H4 : Keahlian DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah

2.4.5 Pertemuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Kinerja Keuangan Bank Syariah

Pertemuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Pertemuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kesamaan dengan pertemuan komite audit. Menurut Karamanou & Vafeas (2005) komite audit yang sering melakukan pertemuan dapat menjalankan fungsi pengawasan lebih baik sehingga perusahaan dapat lebih efisien. Studi empiris yang dilakukan oleh Chariri (2012) menyatakan bahwa kuantitas pertemuan DPS mempunyai hubungan positif terhadap pengungkapan kinerja sosial (CSR) perusahaan sehingga berdampak baik untuk perusahaan.

Studi empiris yang dilakukan oleh Mollah & Zaman (2015) menemukan bahwa DPS memainkan peran pengawasan atau peran penasehat. Penelitian ini mengamati bahwa DPS memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank syariah ketika memainkan peran pengawasan sedangkan sebaliknya berdampak negatif ketika memainkan peran penasehat. Semakin sering Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengadakan pertemuan maka pengawasan terhadap perusahaan akan semakin baik. Dari ulasan penelitian di atas, maka hipotesis kelima sebagai berikut.

H5 : Pertemuan DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah

2.4.6 Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Kinerja Keuangan Bank Syariah

Literatur yang meneliti mengenai pengaruh remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini masih terbatas dan lebih banyak di dominasi oleh remunerasi CEO ataupun direksi. Studi empiris yang dilakukan oleh Main *et. Al* (1996)

menemukan fakta bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi oleh remunerasi dewan. Penelitian ini juga di dukung oleh Conyon & Schwalbach (2000) menggunakan data di Inggris dan Jerman, Kato & Kubo (2006) menggunakan data di Jepang, Merhebi *et. Al* (2006) di Australia dan Lee & Isa (2015) di Malaysia yang menemukan bahwa kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh remunerasi CEO. Sebaliknya, menurut Sheikh & Kareem (2015) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan tidak dipengaruhi oleh remunerasi CEO. Sedangkan Brick *et. Al* (2006) menjelaskan bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi oleh remunerasi CEO dan direktur, akan tetapi pengaruhnya negatif. Sedangkan, Conyon & Muhy (2007) di Inggris dan Zhou (2000) di Kanada hanya menemukan hubungan yang lemah antara remunerasi eksekutif dengan kinerja perusahaan.

Terdapat inkonsistensi terhadap penelitian sebelumnya, selain itu terdapat keterbatasan literatur terhadap penelitian tersebut. Remunerasi DPS harus diungkapkan dalam laporan keuangan untuk menghindari konflik antar *stakeholder*. Maka hipotesis keenam sebagai berikut.

H6 :Remunerasi DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan (*financial performance*) yang diukur dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA).
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, pertemuan komite audit, ukuran DPS, keahlian DPS, pertemuan DPS, dan remunerasi DPS.
3. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran bank syariah (*size*), dan usia bank syariah (*age*).

3.1.1 Kinerja Keuangan Bank Syariah

Penelitian ini tidak menggunakan rasio Tobin's sebagai ukuran kinerja bank karena tidak semua bank syariah yang ada dalam sampel ini terdaftar di bursa saham. Pengukuran kinerja keuangan menggunakan *Return on Asset* (ROA) sebagai berikut :

3.1.1.1 Menghitung *Return on Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{Net\ Income\ i,t}{Total\ asset\ i,t}$$

- *Net Income*_{*i,t*} : Pendapatan bersih pada perusahaan *i* pada tahun *t*
- *Total Asset*_{*i,t*} : Total aset pada perusahaan *i* pada tahun *t*

3.1.2 Ukuran Komite Audit

Menurut peraturan Bapepam LK (Sekarang OJK) Nomor IX 1.5 menjelaskan mengenai komite audit yang merupakan kewajiban yang harus ada pada setiap perusahaan publik. Demikian peraturan dari Bank Indonesia (Sekarang OJK) Nomor 8/4/PBI/2006 mengenai tata kelola perbankan. Komite audit mempunyai peran utama yaitu menjamin dan memastikan kualitas laporan keuangan yang diungkapkan (Wild, 1996). Peraturan Bapepam Nomor IX.1.5 menjelaskan mengenai jumlah komite audit yaitu berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari komisaris independen dan pihak luar. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang diungkapkan serta melakukan tugas pengawasan terhadap informasi keuangan. Pengukuran terhadap variabel ukuran komite audit dilakukan dengan melihat jumlah anggota komite audit yang terdapat di bank syariah.

Ukuran Komite Audit = Jumlah Anggota Komite Audit

3.1.3 Pertemuan Komite Audit

Menurut *agency theory* kuantitas pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dapat mengurangi *agency cost* salah satunya adalah perilaku oportunistik yang dapat menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Pengawasan dapat dilakukan dengan adanya pertemuan anggota komite audit. Menurut PBI Nomor 8/4/PBI/2006 mengenai penerapan GCG dijelaskan mengenai komite audit yang harus melakukan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Komite audit mempunyai peran menjamin kualitas laporan keuangan (Wild, 1996). Pengukuran terhadap variabel pertemuan komite audit dilakukan dengan melihat jumlah rapat selama satu (satu) tahun dalam *Annual Report* (AR).

Pertemuan komite audit = Jumlah rapat komite audit selama 1 tahun

3.1.4 Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Mekanisme CG yang paling membedakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional yaitu DPS. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dipercaya dapat mendorong kinerja bank syariah dengan mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki setidaknya minimal 3 (tiga) anggota yang mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai masalah dalam perbankan syariah (AAOFI, 2010). Pengukuran terhadap ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai berikut :

Ukuran DPS = Jumlah anggota DPS

3.1.5 Keahlian Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Mekanisme CG yang paling membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu DPS. Ada 3 (tiga) peran utama dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu konsultasi, pengendalian dan memastikan. Peran utama termasuk sertifikasi instrumen keuangan yang diizinkan dan penjelasan mengenai cara menghitung zakat (Alnasser & Muhammed, 2012). Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga memainkan peran penting terhadap kontrol internal perusahaan yang memiliki tugas meninjau dan mengawasi kegiatan bank syariah (Darmadi, 2013). Peran yang paling penting dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip hukum yang mengatur mengenai keuangan syariah (ILF) (Hamza, 2013). Selain ahli dalam hal fiqh muamalah DPS juga harus memiliki keahlian dalam bidang perbankan dan keuangan. Hal ini sejalan dengan aturan yang menyatakan bahwa DPS memiliki setidaknya minimal 3 (tiga) anggota yang mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai masalah dalam perbankan syariah (AAOIFI, 2010).

$$\text{Keahlian DPS} = \frac{\text{Jumlah anggota yang memiliki keahlian}}{\text{Total anggota DPS}}$$

3.1.6 Pertemuan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Menurut Karamanou & Vafeas (2005) komite audit yang sering melakukan pertemuan dapat menjalankan fungsi pengawasan lebih baik sehingga perusahaan dapat lebih efisien. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dipercaya dapat meningkatkan efisiensi perusahaan melalui pemantauan dan monitoring yang dapat

dilihat dari banyaknya pertemuan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut Khoirudin (2013) semakin banyak jumlah dewan pengawas syariah maka tingkat pengungkapan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga semakin tinggi sehingga kinerja bank syariah dapat meningkat. Selain ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Chariri (2012) mengungkapkan bahwa frekuensi pertemuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga berhubungan positif terhadap pengungkapan kinerja sosial (CSR) perusahaan.

Pertemuan DPS = frekuensi pertemuan anggota DPS selama 1 tahun

3.1.7 Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Remunerasi dewan juga dapat memainkan peran dalam mempengaruhi kinerja perusahaan. Jumlah remunerasi dapat dihitung sebagai persentase dari laba tahunan, sama seperti remunerasi direksi, atau gaji bulanan, atau jumlah tetap dalam tahunan (Nathan Garas, 2012). AAOIFI merekomendasikan bahwa anggota DPS tidak boleh mengambil bonus atau diluar gaji tetap karena hal tersebut dapat merusak independensi DPS. Selain itu Issa (2009) juga merekomendasikan bahwa remunerasi DPS harus dihitung dengan jumlah yang tetap dan dicatat dalam kontrak DPS, jika tidak anggota DPS tidak boleh menerima hadiah dari manajemen eksekutif. Menurut Al Qari (2002) remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus di ungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan agar lebih transparan dan akuntabel serta untuk menghindari konflik antar *stakeholder*.

$$\text{Remunerasi DPS} = \frac{\text{Total Remunerasi DPS}}{\text{laba bersih}}$$

3.1.8 Ukuran Bank (*Size*)

Menurut Bukair & Abdul Rahman (2015) menyatakan bahwa ukuran bank (*size*) mempengaruhi kinerja bank. Ukuran bank (*size*) dapat hitung dengan menggunakan logaritma natural dari total aset.

3.1.9 Usia Bank (*Age*)

Menurut Rajput & Joshi (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih tua lebih efisien dari pada perusahaan yang memiliki umur yang muda karena dinilai lebih berpengalaman. Usia bank (*age*) diukur dengan melihat jumlah tahun sejak berdirinya perusahaan tersebut (Ammann et al., 2011).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu perbankan syariah yang terdapat di 2 (dua) negara yaitu Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di otoritas moneter setiap negara seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia yaitu sebanyak 13 (tiga belas) bank syariah dan Bank Negara Malaysia (BNM) di Malaysia sebanyak 16 (enam belas) bank syariah. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a) Perusahaan perbankan syariah yang terdaftar secara resmi di otoritas moneter di masing-masing negara.
- b) Perusahaan perbankan syariah yang mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) periode 2014-2018.
- c) Perusahaan perbankan syariah yang memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder yang telah ada sebelumnya berupa laporan tahunan (*annual report*) yang telah dipublikasikan oleh perbankan syariah. Data sekunder ini diperoleh dari situs resmi atau *website* perbankan syariah di masing-masing negara Indonesia dan Malaysia.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan yang sudah ada berupa laporan tahunan perusahaan yang telah dipublikasikan di masing-masing *website* perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan metode studi pustaka yaitu metode dengan memperoleh data dari berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, artikel dan literatur lain yang mendukung penelitian.

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif untuk menjelaskan variabel dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk melihat hubungan linear antar dua atau lebih variabel independen. Selanjutnya, terakhir penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah variabel telah memenuhi asumsi klasik dalam model regresi.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016) statistik deskriptif memberikan gambaran umum atau deskripsi dari seluruh variabel dengan menyajikan data penelitian dengan menggunakan beberapa pengukuran yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, sum, rata-rata (*mean*), range standar deviasi, varian, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persebaran data dan menggambarkan variabel-variabel penelitian seperti *mean*, standar deviasi, maksimum dan minimum. Penelitian ini menggunakan ukuran numerik yang merupakan data yang disederhanakan selanjutnya akan dijelaskan dan diinterpretasikan.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis regresi untuk menghindari kebiasaan dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah persamaan garis regresi yang diperoleh bersifat linier, valid, tidak bias, konsisten dan efisien dalam penaksiran koefisien regresinya. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam melakukan analisis data. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independen atau variabel dependen dalam model regresi terdistribusi dengan normal (Ghozali, 2016). Normalitas suatu variabel dapat dilihat dari persebaran

data melalui grafik atau melihat histogram dari residunya, atau dapat juga menggunakan komponen normalitas seperti *skewness* dan *kurtosis*.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat hubungan antar variabel independen (Ghozali, 2016). Jika dalam melakukan pengujian terdapat korelasi maka dapat dikatakan telah terjadi multikolinieritas. Multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) yang akan diketahui keterkaitan antara variabel independen. Pengertian yang sederhana dimana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregres dengan variabel independen yang lainnya. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Multikolinieritas dapat diukur dengan melihat nilai *cut off* dimana nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2016).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu dalam model regresi. Jika varians dari residual dalam pengamatan tetap maka terjadi homoskedastisitas. Sebaliknya, jika varians berubah maka terjadi heteroskedstisitas. Menurut Ghozali (2016), model regresi yang baik yaitu yang tidak terdapat heteroskedastisitas atau terdapat homoskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan metode Uji Glejser untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu dalam periode t dengan periode $t-1$ atau periode sebelumnya. Autokorelasi timbul disebabkan oleh observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. Masalah ini disebut *problem* autokorelasi, selain itu hal ini juga disebabkan karena adanya korelasi antara residual dalam periode t dengan dengan residual pada periode $t-1$ pada model regresi. Masalah ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) dan jarang ditemukan pada data silang waktu (*crosssection*). Menurut Ghozali (2016) model regresi yang baik yaitu yang tidak terdapat autokorelasi. Autokorelasi dapat dideteksi dengan beberapa cara. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dengan cara melakukan penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Penilaian Uji Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No desicison	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No desicison	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber : Ghozali (2016)

3.5.3 Analisis Regresi

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda (*multiple linear regression*). Menurut Sugiyono (2014) analisis regresi linier berganda (*multiple linear regression*) merupakan analisis yang digunakan untuk memprediksi keadaan dari variabel dependen jika dua atau lebih variabel independen dinaikkan atau diturunkan. Analisis regresi berganda (*multiple linear regression*) melibatkan lebih dari satu variabel independen atau variabel bebas.

Persamaan regresi linier berganda (Ghozali, 2016) :

$$ROA = \alpha + \beta_1 ACSIZE + \beta_2 ACMEETS + \beta_3 SSBSIZE + \beta_4 SSBEXPERT + \beta_5 SSBMEETS + \beta_6 SSBREMUN + \beta_7 SIZE + \beta_8 AGE + e$$

Keterangan:

ROA : *Return On Asset* pada perbankan syariah

ACSIZE : Ukuran komite audit pada perbankan syariah

ACMEETS : Pertemuan komite audit pada perbankan syariah

SSBSIZE : Ukuran DPS pada perbankan syariah

SSBEXPERT : Keahlian DPS pada perbankan syariah

SSBMEET : Pertemuan DPS pada perbankan syariah

SSBREMUN : Remunerasi DPS pada perbankan syariah

SIZE : Ukuran bank syariah

AGE : Umur bank syariah

Model ini bertujuan untuk menguji pengaruh komite audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kinerja keuangan bank syariah. Variabel dependen yang diwakili oleh *Return On Asset* (ROA) sedangkan variabel independennya yaitu ACSIZE, ACMEETS, SSBSIZE, SSBEXPERT, SSBMEETS, SSBREMUN. Selain itu penelitian ini juga memiliki variabel kontrol yaitu SIZE dan AGE.

3.5.4 Pengujian Hipotesis

3.5.4.1 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Tujuan menggunakan uji statistik F adalah untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh dari variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Untuk menguji hipotesis digunakan statistik F dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Apabila probabilitas signifikansi > 0.05 , maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ho diterima dan Ha ditolak).
2. Apabila probabilitas signifikansi < 0.05 , maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen (Ho ditolak dan Ha diterima).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho : Variabel-variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam penelitian.

Ha : Variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam penelitian.

3.5.4.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut Ghozali (2016) nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil memiliki makna keterbatasan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati satu memiliki makna bahwa variabel independen mampu menerangkan segala informasi untuk memprediksi variabel dependen. Penggunaan koefisien determinasi memiliki kelemahan dalam penggunaannya yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Koefisien determinasi (R^2) akan meningkat apabila ada tambahan satu variabel independen, tidak peduli pengaruhnya signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Nilai Adjusted R^2 dianjurkan untuk digunakan dalam mengevaluasi model regresi yang terbaik. Nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun pada saat satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

3.5.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji statistik t pada dasarnya memiliki tujuan yaitu untuk melihat pengaruh dari satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi dari variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi dan Objek Penelitian

Objek dari Penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdaftar secara resmi di otoritas moneter masing-masing negara yaitu Indonesia dan Malaysia pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Sampel penelitian ini diambil secara acak atau tidak berurut-urut dengan metode *purposive sampling* untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh ukuran komite audit, pertemuan komite audit, ukuran DPS, keahlian DPS, pertemuan DPS, remunerasi DPS terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini memiliki sampel pengamatan berjumlah 105 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Populasi dan Sampel

No	Kriteria	2014	2015	2016	2017	2018
1	Perbankan syariah yang terdaftar di otoritas moneter masing-masing negara	28	28	29	29	29
2	Perbankan syariah yang tidak mempunyai data lengkap	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)
3	Perbankan syariah yang mempunyai data lengkap	21	21	21	21	21
Jumlah Sampel		105				

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui populasi dan sampel masing-masing perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Data diatas menunjukkan bahwa jumlah populasi perbankan syariah di masing-masing negara Indonesia dan Malaysia tahun 2014 sampai dengan 2018 berjumlah 143, sedangkan sebanyak 38 bank syariah yang tidak mempunyai data lengkap. Perbankan syariah yang memiliki kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu sebanyak 21 perbankan syariah pada tahun 2014-2018, sehingga total sampel penelitian berjumlah 105 pengamatan.

4.2 Analisis Data

Dalam sub-bab ini akan dijelaskan mengenai teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu statistik deskriptif dan juga uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedestisitas, uji autokorelasi dan selanjutnya dilakukan uji hipotesis pada model regresi.

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis data yang pertama dilakukan yaitu analisis statistik deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui gambaran dari 105 sampel penelitian yang terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean (rata-rata), modus dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut hasil dari analisis statistik deskriptif masing-masing variabel :

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Mode	Std. Dev
ROA	105	-0,1689	0,0920	0,0106	-0,1689	0,0352
ACSIZE	105	2,0000	9,0000	4,1238	3,0000	1,3280
ACMEETS	105	3,0000	31,0000	10,6095	6,0000	5,6797
SSBSIZE	105	2,0000	9,0000	3,7334	2,0000	1,8254
SSBEXPERT	105	0,5000	1,0000	0,8869	1,0000	0,1719
SSBMEETS	105	6,0000	30,0000	12,1048	12,0000	4,0784
SSBREMUN	105	-0,0428	0,1711	0,0123	-0,0428	0,0293
SIZE	105	17,5100	23,8700	21,0774	17,5041	1,4214
AGE	105	1,0000	44,0000	18,0000	6,0000	13,6614
INDONESIA						
ROA	60	-0,1688	0,0802	-0,0022	-0,1689	0,0391
ACSIZE	60	2,0000	7,0000	3,9170	2,0000	1,1973
ACMEETS	60	3,0000	31,0000	11,2000	3,0000	5,8216
SSBSIZE	60	2,0000	3,0000	2,3000	2,0000	0,4621
SSBEXPERT	60	0,5000	1,0000	0,8611	0,5000	0,2039
SSBMEETS	60	7,0000	30,0000	13,4000	12,0000	3,9065
SSBREMUN	60	-0,0428	0,1711	0,0191	-0,0428	0,0372
SIZE	60	17,5000	22,7000	20,3110	17,5041	1,3055
AGE	60	1,0000	28,0000	10,3330	6,0000	7,6947
MALAYSIA						
ROA	45	0,0113	0,0919	0,0276	0,0113	0,0189
ACSIZE	45	2,0000	9,0000	4,4000	3,0000	1,4523
ACMEETS	45	4,0000	24,0000	9,8220	4,0000	5,4493
SSBSIZE	45	5,0000	9,0000	5,6440	5,0000	1,0259
SSBEXPERT	45	0,6000	1,0000	0,9213	1,0000	0,1096
SSBMEETS	45	6,0000	18,0000	10,378	8,0000	3,6760
SSBREMUN	45	0,0002	0,0178	0,0031	0,0002	0,0044
SIZE	45	21,3000	23,8700	22,1000	21,2744	0,7868
AGE	45	8,0000	44,0000	28,2220	9,0000	13,2183

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Jumlah sampel penelitian (N) sebanyak 105 pengamatan pada bank umum syariah yang terdaftar dimasing-masing otoritas moneter di Indonesia dan Malaysia. Variabel dependen dalam

penelitian ini yaitu kinerja keuangan bank syariah yang diukur menggunakan ukuran *Return on Assets* (ROA) yang memiliki nilai minimum sebesar -0,1689, hal ini menunjukkan bahwa adanya bank syariah yang mengalami kerugian sebesar 0,16%. Bank syariah yang mengalami kerugian terdapat di Indonesia sedangkan nilai minimum ROA dari bank syariah di Malaysia sebesar 0,0113. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah di Malaysia paling minimum mendapatkan keuntungan sebesar 0,01%. Nilai maksimum dari ROA di Indonesia sebesar 0,0802 sedangkan di Malaysia sebesar 0,0920. Nilai ROA tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah di Malaysia mendapatkan keuntungan lebih besar dari pada perbankan syariah yang ada di Indonesia. Nilai rata-rata dari ROA sebesar 0,0106 yang menunjukkan bahwa rata-rata bank syariah memperoleh laba bersih (*net income*) dari total aset perusahaan sebesar 0,01 %. Deviasi standar dari ROA sebesar 0,0352 lebih tinggi dari nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa ROA memiliki persebaran data yang tinggi dalam penilaian terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Nilai minimum dari variabel ukuran komite audit (ACSIZE) yaitu sebesar 2, hal ini menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia dan Malaysia paling sedikit memiliki anggota komite audit berjumlah 2 orang. Nilai maksimum dari ACSIZE di Indonesia sebesar 7 sedangkan di Malaysia sebesar 9. Nilai ACSIZE tersebut menunjukkan bahwa ukuran komite audit di Malaysia lebih besar dari pada ukuran komite audit yang ada di Indonesia. Nilai modus dari ACSIZE sebesar 3 menunjukkan bahwa bank syariah sebagian besar telah mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Bapepam mengenai jumlah komite audit paling sedikit 3 (orang).

Nilai rata-rata dan deviasi standar sebesar 4,1238 dan 1,3280 menunjukkan bahwa jumlah komite audit pada bank syariah memiliki persebaran data rendah dalam penilaian terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Nilai minimum dari variabel pertemuan komite audit (ACMEETS) sebesar 3 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 31. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pertemuan atau rapat komite audit paling sedikit berjumlah 3 kali dalam satu periode dan frekuensi pertemuan komite audit paling banyak 31 kali dalam satu periode. Nilai maksimum ACMEETS di Indonesia sebesar 31 sedangkan di Malaysia sebesar 24. Nilai ACMEETS tersebut menunjukkan bahwa jumlah pertemuan komite audit di Indonesia lebih sering dilakukan dibandingkan Malaysia. Nilai Modus dari ACMEETS yaitu sebesar 6 sedangkan nilai dari standar deviasinya sebesar 5,6797. Dilihat dari nilai modus ACMEETS hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar bank syariah telah mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (PBI) (Sekarang OJK). Nilai rata-rata dan deviasi standar dari ACMEETS sebesar 10,6095 dan 5,6797 menunjukkan bahwa pertemuan komite audit pada bank syariah memiliki persebaran data rendah dalam penilaian terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Nilai minimum dari variabel ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) (SSBSIZE) yaitu sebesar 2 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 9. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah yang memiliki jumlah anggota paling sedikit 2 dan paling banyak berjumlah 9. Nilai maksimum SSBSIZE di Indonesia sebesar 2 sedangkan di Malaysia sebesar 9. Nilai SSBSIZE tersebut menunjukkan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Malaysia lebih besar dari pada yang ada

di Indonesia. Nilai modus dari variabel ukuran Dewan Pengawas Syariah (SSBSIZE) di Indonesia sebesar 2 sedangkan di Malaysia sebesar 5. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Malaysia telah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh AAOFI yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki setidaknya 3 (tiga) orang anggota yang mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai permasalahan dalam perbankan syariah. Sedangkan ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia juga telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yaitu jumlah anggota DPS minimal berjumlah 2 orang. Nilai rata-rata sedangkan standar deviasinya sebesar 1,825391. Nilai rata-rata dan deviasi standar dari SSBSIZE sebesar 3,7334 dan 1,8254 menunjukkan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank syariah memiliki persebaran data rendah dalam penilaian terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Nilai minimum dari variabel keahlian Dewan Pengawas Syariah (SSBEXPERT) sebesar 0,5 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa DPS yang memiliki keahlian dalam hal yurisprudensi atau hukum-hukum syariah paling sedikit 0,5% dari total anggota DPS. Nilai maksimum dari SSBEXPERT yaitu sebesar 1 yang terdapat di Indonesia dan Malaysia, hal ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai keahlian sebesar 100% dari total anggota DPS. Nilai rata-rata SSBEXPERT sebesar 0,8869 sedangkan deviasi standarnya sebesar 0,1719. Nilai rata-rata dan deviasi standar tersebut menunjukkan bahwa SSBEXPERT memiliki persebaran data yang tinggi dalam penelitian.

Nilai minimum dari variabel pertemuan Dewan Pengawas Syariah (SSBMEETS) sebesar 6 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 30. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan DPS (SSBMEETS) paling sedikit berjumlah 6 kali dalam satu periode. Nilai maksimum SSBMEETS di Indonesia sebesar 30 sedangkan di Malaysia sebesar 18. Nilai SSBMEETS tersebut menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan DPS di Indonesia lebih sering dilakukan dibandingkan Malaysia. Nilai modus dari SSBMEETS yaitu sebesar 12, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perbankan syariah telah melakukan pertemuan sebanyak 12 kali dalam satu periode. Nilai rata-rata dan deviasi standar SSBMEETS sebesar 12,1048 dan 4,0784. Nilai rata-rata dan deviasi standar tersebut menunjukkan bahwa SSBMEETS memiliki persebaran data yang rendah dalam penelitian.

Nilai minimum dari variabel remunerasi Dewan Pengawas Syariah (SSBREMUN) sebesar -0,0428 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,1711. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah remunerasi Dewan Pengawas Syariah (SSBREMUN) paling sedikit berjumlah 0,04% dari total kerugian bank syariah. Nilai maksimum SSBREMUN di Indonesia sebesar 0,1711 sedangkan di Malaysia sebesar 0,0178. Nilai SSBREMUN tersebut menunjukkan bahwa remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan Malaysia yaitu paling banyak sebesar 0,17% dari total laba bersih (*net income*) bank syariah. Nilai rata-rata dan deviasi standar dari SSBREMUN yaitu sebesar 0,0123 dan 0,0293. Hal ini menunjukkan bahwa variabel SSBREMUN memiliki persebaran data rendah dalam penelitian.

Nilai minimum dari variabel ukuran bank syariah (SIZE) sebesar 17,5100 dan nilai maksimumnya sebesar 23,8700. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran bank syariah (SIZE) paling kecil sebesar 17,5100 dari LN total aset bank syariah. Nilai maksimum SIZE menunjukkan bahwa ukuran bank syariah paling besar sebesar 23,8700 dari LN total aset bank syariah. Nilai maksimum SIZE di Indonesia sebesar 22,7000 sedangkan di Malaysia sebesar 23,870. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran bank syariah (SIZE) di Malaysia lebih besar dibandingkan ukuran bank syariah di Indonesia. Nilai rata-rata dan deviasi standar dari SIZE sebesar 21,0774 dan 1,4214. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran bank syariah memiliki persebaran data yang tinggi dalam penelitian.

Nilai minimum dari variabel umur bank syariah (AGE) sebesar 1 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 44. Hal ini menunjukkan bahwa umur bank syariah (AGE) paling sedikit berjumlah 1 (satu) tahun terdapat di Indonesia dimana adanya bank daerah yang melakukan *split off* atau mengkonversi diri menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Nilai maksimum AGE di Indonesia sebesar 28 sedangkan di Malaysia sebesar 44. Hal ini menunjukkan bahwa umur perbankan syariah di Malaysia lebih lama dibandingkan umur perbankan syariah yang ada di Indonesia. Nilai rata-rata dari umur bank syariah yaitu sebesar 18,0000 sedangkan nilai dari deviasi standarnya sebesar 13,6614. Nilai rata-rata dan deviasi standar dari umur bank syariah menunjukkan bahwa variabel umur bank syariah memiliki persebaran data yang rendah dalam penilaian terhadap kinerja keuangan bank syariah.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hasil regresi yang baik yang dibutuhkan dalam model serta terhindar dari masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang akan dijelaskan pada sub bab ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedestisitas dan uji autokorelasi.

4.2.2.1 Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji *Test Statistic Kolmogorov-Smirnov*. Uji *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan pendekatan *Monte Carlo* untuk menghasilkan nilai *p* yang dapat dipercaya dan terhindar dari bias. Hasil *Test Statistic Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual	
N		105	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	1,80719744	
Most Extreme Differences	Absolute	,060	
	Positive	,051	
	Negative	-,060	
Test Statistic		,060	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,819 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,809
		Upper Bound	,829

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber : Olah Data Sekunder tahun 2020

Berdasarkan nilai *Test Statistic Kolmogorov-Smirnov* yang terdapat pada tabel 4.3 adalah 0,060 sedangkan nilai signifikan dari *Monte Carlo* sebesar 0,819 atau tidak signifikan pada 0,05. Selain itu nilai *p* dengan tingkat kepercayaan 99% menunjukkan nilai antara 0,829 dan 0,809 atau tidak signifikan pada 0,05. Dari Uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian sesuai dengan pendapat Ghozali (2016) dimana data terdistribusi dengan normal atau tidak menyalahi asumsi klasik.

4.2.2.2 Uji Multikolonieritas

Penelitian ini menggunakan uji multikolonieritas untuk melihat keterkaitan antar variabel bebas. Hasil uji multikolonieritas ditunjukkan oleh tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
ACSIZE	0,796	1,257
ACMEETS	0,802	1,247
SSBSIZE	0,326	3,071
SSBEXPERT	0,920	1,087
SSBMEETS	0,684	1,462
SSBREMUN	0,811	1,232
SIZE	0,362	2,761
AGE	0,362	2,497

Sumber: Olah Data Sekunder tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 sedangkan nilai nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) semua variabel tidak ada yang melebihi 10. Hal ini sesuai dengan pendapat Ghozali

(2016) dimana tidak terjadi multikolonieritas apabila nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 . Maka dapat disimpulkan bahwa data pada sampel penelitian tidak terdapat multikolonieritas antar variabel bebas atau variabel independennya dan telah memenuhi asumsi klasik.

4.2.2.3 Uji Heteroskedestisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Penelitian ini menggunakan uji glejser yang terdapat pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Gambar 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a		
Model	t	Sig.
1 (Constant)	0,433	0,666
LNACSIZE	-0,089	0,929
LNACMEETS	-0,737	0,463
LNSSBSIZE	-1,894	0,061
LNSSBEXPERT	1,656	0,101
LNSSBMEETS	0,287	0,775
LNSSBREMUN	-0,769	0,444
LNSIZE	-0,083	0,934
LNAGE	0,877	0,382

a. Dependent Variable: ABS_RES1
Sumber: Olah Data Sekunder tahun 2020

Hasil uji glejser sebelumnya terdapat heteroskedastisitas, akan tetapi telah diobati dengan melakukan Log Natural (LN). Dilihat dari tabel 4.5 mengenai hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang signifikan pada

0,05 atau 5%. Semua variabel independen menunjukkan nilai signifikan $> 0,05$. Hal ini sesuai dengan pendapat Ghozali (2016) dimana tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikan tidak ada yang dibawah 0,05 atau 5%. Dari hasil uji glejser tersebut dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW) untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi. Hasil uji autokorelasi sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,747 ^a	0,557	0,521	1,88091	1,978

a. Predictors: (Constant), AGE, ACMEETS, SSBEXPERT, SSBREMUN, ACSIZE, SSBMEETS, SIZE, SSBSIZE

b. Dependent Variable: ROA

Sumber: Olah Data Sekunder tahun 2020

Tabel 4.7
Nilai Durbin Watson

K= 9, N = 90

Model	DW	D _u	D _l	4-D _u	Keterangan
1	1,987	1,8483	1,5220	2,1517	Tidak ada autokorelasi

Sumber: Olah Data Sekunder tahun 2020

Hasil uji Durbin Watson ditunjukkan pada tabel 4.6 sedangkan perhitungan terhadap pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi terdapat pada gambar 4.7. Hasil uji Durbin Watson dengan sampel penelitian berjumlah 105 dan

$k = 8$ dengan tingkat signifikansi 0,05 didapat nilai D_u sebesar 1,8483 sedangkan nilai D_l sebesar 1,5220. Nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,987 lebih tinggi dari nilai D_u dan lebih kecil dari nilai $4 - D_u$ yakni sebesar 2,1517. Menurut Ghazali (2016) tidak terjadi autokorelasi apabila tidak melebihi atau kurang dari daerah kritis. Dari uji Durbin Watson tersebut dapat disimpulkan bahwa pada model regresi dalam penelitian tidak terdapat masalah autokorelasi atau tidak menyalahi asumsi klasik.

4.2.3 Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai uji signifikan simultan / uji statistik F, koefisien determinasi, dan uji statistik t terhadap 6 hipotesis penelitian.

4.2.3.1 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Tujuan menggunakan uji statistik F adalah untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh dari variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji signifikan simultan atau uji statistik F ditunjukkan oleh tabel 4.8 sebagai berikut.

Tabel 4.8
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	427,781	8	53,472	15,113	,000 ^b
	Residual	339,660	96	3,538		
	Total	767,441	104			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), AGE, ACMEETS, SSBEXPERT, SSBREMUN, ACSIZE, SSBMEETS, SIZE, SSBSIZE
 Sumber: Olah Data Sekunder tahun 2020

Berdasarkan hasil uji statistik F yang terdapat pada tabel 4.8 diketahui nilai F sebesar 15,113 dengan probabilitas 0,000. Nilai probabilitas pada uji F diatas lebih kecil dan signifikan pada 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yaitu ukuran komite audit (ACSIZE), pertemuan komite audit (ACMEETS), ukuran DPS (SSBSIZE), keahlian DPS (SSBEXPERT), pertemuan DPS (SSBMEETS), remunerasi DPS (SSBREMUN) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah.

4.2.3.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut Ghozali (2016) nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Hasil koefisien determinasi dari uji hipotesis ditunjukkan oleh tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,747 ^a	,557	,521	1,880991

a. Predictors: (Constant), AGE, ACMEETS, SSBEXPERT, SSBREMUN, ACSIZE, SSBMEETS, SIZE, SSBSIZE

b. Dependent Variable: ROA

Sumber: Olah Data Sekunder tahun 2020

Pada tabel 4.9 menunjukkan nilai adjusted R Square sebesar 0,521. Hal ini menunjukkan ukuran komite audit (ACSIZE), pertemuan komite audit

(ACMEETS), ukuran DPS (SSBSIZE), keahlian DPS (SSBEXPERT), pertemuan DPS (SSBMEETS), remunerasi DPS (SSBREMUN), ukuran bank (SIZE), umur bank (AGE) dapat menjelaskan kinerja keuangan bank syariah sebesar 52,1% dan sisanya sebesar 47,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

4.2.3.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya memiliki tujuan yaitu untuk melihat pengaruh dari satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Pengambilan keputusan diterima atau tidaknya hipotesis dilihat dari nilai β yang sesuai dengan arah hipotesis yang memiliki nilai probabilitas signifikan 0,05. Hasil uji parameter individual atau uji statistik ditunjukkan oleh tabel 4.10 sebagai berikut.

Tabel 4.10
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	44,541	12,475		3,570	0,001
ACSIZE	1,760	0,679	0,197	2,590	0,011
ACMEETS	-0,632	0,389	-0,123	-1,625	0,107
SSBSIZE	3,713	0,671	0,658	5,534	0,000
SSBEXPERT	1,936	0,844	0,162	2,295	0,024
SSBMEETS	-0,203	0,694	-0,024	-0,293	0,770
SSBREMUN	39,418	6,921	0,429	5,695	0,000
SIZE	-20,462	4,471	-0,516	-4,577	0,000
AGE	-0,617	0,340	-0,195	-1,816	0,073

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Olah Data Sekunder tahun 2020

Dari tabel 4.10 diatas maka persamaan matematis sebagai berikut :

$$\text{ROA} = 44,541 + 1,760 \text{ ACSIZE} - 0,632 \text{ ACMEETS} + 3,713 \text{ SSBSIZE} + 1,936 \text{ SSBEXPERT} - 0,203 \text{ SSBMEETS} + 39,418 \text{ SSBREMUN} - 20,462 \text{ SIZE} - 0,617 \text{ AGE}$$

4.2.3.3.1 Variabel Independen

Hipotesis satu (H1) pada tabel 4.10 memiliki nilai koefisien regresi positif, hal ini membuktikan bahwa ukuran komite audit (ACSIZE) berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Nilai t hitung ukuran komite audit (ACSIZE) sebesar 2,590 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,011 atau signifikan pada level 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil keputusan bahwa hipotesis satu (H1) mengenai ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah **diterima**.

Hipotesis dua (H2) pada tabel 4.10 diatas memiliki nilai koefisien regresi negatif, hal ini membuktikan bahwa pertemuan komite audit (ACMEETS) memiliki pengaruh negatif terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Nilai t hitung pertemuan komite audit (ACMEETS) sebesar -1,625 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,107 atau tidak signifikan pada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat

diambil keputusan bahwa hipotesis dua (H2) mengenai pertemuan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah **ditolak**.

Hipotesis tiga (H3) pada tabel 4.10 memiliki nilai koefisien regresi positif, hal ini membuktikan bahwa ukuran DPS (SSBSIZE) memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Nilai t hitung ukuran DPS (SSBSIZE) sebesar 5,534 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,000 atau signifikan pada level 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran DPS (SSBSIZE) memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil keputusan bahwa hipotesis tiga (H3) mengenai ukuran DPS memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah **diterima**.

Hipotesis empat (H4) pada tabel 4.10 diatas memiliki nilai koefisien regresi positif, hal ini membuktikan bahwa keahlian DPS (SSBEXPERT) memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Nilai t hitung keahlian keuangan Dewan Pengawas Syariah (SSBEXPERT) sebesar 2,295 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,024 atau signifikan pada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa keahlian DPS (SSBEXPERT) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diambil keputusan bahwa hipotesis empat (H4) mengenai keahlian DPS memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah **diterima**.

Hipotesis lima (H5) pada tabel 4.10 diatas memiliki nilai koefisien regresi negatif, hal ini membuktikan bahwa pertemuan DPS (SSBMEETS) memiliki

pengaruh negatif terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Nilai t hitung pertemuan DPS (SSBMEETS) sebesar -0,293 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,770 atau tidak signifikan pada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan DPS (SSBMEETS) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diambil keputusan bahwa hipotesis lima (H5) mengenai pertemuan DPS memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah **ditolak**.

Hipotesis enam (H6) pada tabel 4.10 diatas memiliki nilai koefisien regresi positif, hal ini membuktikan bahwa remunerasi DPS (SSBREMUN) memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Nilai t hitung remunerasi DPS (SSBREMUN) sebesar 5,695 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,000 atau signifikan pada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa remunerasi DPS (SSBREMUN) memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diambil keputusan bahwa hipotesis enam (H6) mengenai remunerasi DPS memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah **diterima**.

4.2.3.3.2 Variabel Kontrol

Pada tabel 4.9 diatas ukuran bank syariah (SIZE) memiliki nilai koefisien regresi sebesar negatif, hal ini membuktikan bahwa ukuran bank syariah (SIZE) memiliki pengaruh negatif terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Nilai t hitung ukuran bank syariah (SIZE) sebesar -4,577 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,000 atau signifikan pada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa

ukuran bank syariah (SIZE) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah.

Variabel umur bank syariah (AGE) memiliki nilai koefisien regresi negatif, hal ini membuktikan bahwa umur bank syariah (AGE) memiliki pengaruh negatif terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Nilai t hitung umur bank syariah (AGE) sebesar -1,816 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,073 atau tidak signifikan pada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa umur bank syariah (AGE) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah.

4.3 Intrepretasi Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran komite audit (ACSIZE), pertemuan komite audit (ACMEETS), ukuran DPS (SSBSIZE), keahlian DPS (SSBEXPERT), pertemuan DPS (SSBMEETS), remunerasi DPS (SSBREMUN) terhadap kinerja keuangan bank syariah. Selain itu ukuran bank syariah (SIZE) dan umur bank syariah (AGE) digunakan sebagai variabel kontrol. Pengambilan keputusan diterima atau tidaknya hipotesis dilihat dari nilai β yang sesuai dengan arah hipotesis yang memiliki nilai probabilitas signifikan 0,05. Nilai β pada penelitian ini tidak menunjukkan besarnya pengaruh, tetapi hanya untuk melihat arah hipotesis. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai intrepretasi hasil dari uji hipotesis dalam penelitian. Tabel 4.11 menunjukkan ringkasan dari hasil uji hipotesis. Sub-bab 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 akan menjelaskan mengenai intrepretasi hasil dari masing-masing hipotesis.

Tabel 4.11
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

	Hipotesis	B	<i>p-value</i>	Kesimpulan
H1	Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah	Positif	0,011	H1 diterima
H2	Pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah.	Negatif	0,107	H2 ditolak
H3	Ukuran DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah	Positif	0,000	H3 diterima
H4	Keahlian DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah	Positif	0,024	H4 diterima
H5	Pertemuan DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah	Negatif	0,770	H5 ditolak
H6	Remunerasi DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah	Positif	0,000	H6 diterima

4.3.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Ukuran komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Ringkasan hasil uji hipotesis yang ditunjukkan oleh tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi positif dengan tingkat probabilitas sebesar 0,011 atau signifikan pada level 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran

komite audit (ACSIZE) memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Dimana semakin banyak jumlah komite audit pada perbankan syariah maka peningkatan terhadap kinerja keuangan bank syariah tersebut semakin baik.

Hal ini juga dijelaskan oleh hasil dari statistik deskriptif yang terdapat pada tabel 4.2, dimana nilai minimum dari variabel ukuran komite audit (ACSIZE) yaitu sebesar 2, nilai maksimum ACSIZE sebesar 9, nilai modus dari ACSIZE sebesar 3 sedangkan nilai deviasi standar sebesar 1,3280. Nilai maksimum dari ACSIZE di Indonesia sebesar 7 sedangkan di Malaysia sebesar 9. Nilai ACSIZE tersebut menunjukkan bahwa ukuran komite audit di Malaysia lebih besar dari pada ukuran komite audit yang ada di Indonesia. Nilai modus ukuran komite audit menunjukkan bahwa bank syariah sebagian besar telah mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Bapepam dimana jumlah komite audit minimal 3 (tiga) anggota yang berasal dari komisaris independen. Nilai rata-rata dan deviasi standar sebesar 4,1238 dan 1,3280 menunjukkan bahwa jumlah komite audit pada bank syariah memiliki persebaran data rendah. Dari hasil tersebut maka dapat diambil keputusan bahwa jumlah komite audit pada bank syariah yang mematuhi aturan Bapepam dipercaya dapat meningkatkan kinerja keuangan bank syariah.

Penelitian ini sesuai dengan teori agensi (*agency theory*) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, hal ini disebabkan monitoring yang dilakukan oleh komite audit terhadap laporan keuangan yang semakin sering dilakukan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Linda (2012) yang menyatakan bahwa keberadaan komite

audit dengan melakukan *monitoring* terhadap perusahaan dapat meminimumkan biaya agensi (*agency cost*) sehingga dapat mencapai efisiensi dan peningkatan terhadap kinerja keuangan. Selain itu ukuran komite audit juga dapat meminimalkan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan. Menurut Manik (2011) komite audit sebagai bagian dari struktur CG, yang pada prakteknya dapat meminimalisir terjadinya *fraud* pada laporan keuangan perusahaan dengan menjunjung prinsip GCG. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya jumlah komite audit pada bank syariah akan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan disebabkan oleh monitoring yang dilakukan serta meminimalkan terjadinya *fraud* pada laporan keuangan.

4.3.2 Pengaruh Pertemuan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Pertemuan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Ringkasan hasil uji hipotesis yang ditunjukkan oleh tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi negatif dengan tingkat probabilitas sebesar 0,107 atau tidak signifikan pada level 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan komite audit (ACMEETS) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Dimana semakin banyak pertemuan komite audit pada bank syariah maka tidak berpengaruh pada kinerja keuangan bank syariah.

Hal ini juga dijelaskan oleh hasil dari statistik deskriptif yang terdapat pada tabel 4.2, dimana nilai minimum dari pertemuan komite audit (ACMEETS) yaitu

sebesar 3, nilai maksimum ACMEETS sebesar 31, nilai modus sebesar 6 dan nilai deviasi standar sebesar 5,6797. Nilai maksimum ACMEETS di Indonesia sebesar 31 sedangkan di Malaysia sebesar 24. Nilai ACMEETS tersebut menunjukkan bahwa jumlah pertemuan komite audit di Indonesia lebih sering dilakukan dibandingkan Malaysia. Nilai modus ACMEETS menunjukkan bahwa sebagian besar bank syariah telah mematuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) (Sekarang OJK) Nomor 8/4/PBI/2006 dimana komite audit harus melakukan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Nilai rata-rata dan deviasi standar dari ACMEETS sebesar 10,6095 dan 5,6797 menunjukkan bahwa pertemuan komite audit pada bank syariah memiliki persebaran data rendah. Dari hasil tersebut maka dapat diambil keputusan bahwa pertemuan komite audit (ACMEETS) pada bank syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hsu & Petchsakulwong (2010) yang menemukan fakta bahwa frekuensi pertemuan komite audit memiliki hubungan negatif terhadap efisiensi pendapatan. Akan tetapi dalam penelitian ini hubungan negatif antara pertemuan komite audit terhadap kinerja bank syariah tidak signifikan. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajili & Bouri (2018) yang mengungkapkan bahwa pertemuan komite audit tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak frekuensi pertemuan komite audit belum tentu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Wild (1996) berpendapat bahwa fokus utama komite audit adalah untuk menjamin kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik tetapi tidak meningkatkan kinerja keuangan.

4.3.3 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Ringkasan hasil uji hipotesis yang ditunjukkan oleh tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi positif dengan tingkat probabilitas sebesar 0,000 atau signifikan pada level 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran DPS memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Semakin banyak jumlah DPS pada bank syariah maka dapat meningkatkan kinerja keuangan bank syariah.

Hal ini juga dijelaskan oleh hasil dari statistik deskriptif yang terdapat pada tabel 4.2, dimana nilai minimum dari variabel ukuran DPS yaitu sebesar 2, nilai maksimum sebesar 9. Nilai maksimum SSBSIZE di Indonesia sebesar 2 sedangkan di Malaysia sebesar 9. Nilai SSBSIZE tersebut menunjukkan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Malaysia lebih besar dari pada yang ada di Indonesia. Nilai modus sebesar 2 dan nilai standar deviasi sebesar 1,8254. Nilai modus menunjukkan bahwa paling banyak perbankan syariah mempunyai jumlah anggota DPS sebanyak 2 orang. Dari hasil tersebut maka dapat diambil keputusan bahwa ukuran DPS pada bank syariah dapat meningkatkan kinerja keuangan bank syariah

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mollah & Zaman (2015) yang menemukan fakta bahwa DPS dapat memainkan peran pengawasan atau peran penasehat. Penelitian ini mengamati bahwa DPS yang memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank syariah ketika memainkan peran

pengawasan sedangkan memiliki hubungan negatif apabila memainkan peran penasehat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia dan Malaysia lebih banyak memainkan perannya sebagai pengawas dari pada penasehat.

4.3.4 Pengaruh Keahlian Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Keahlian DPS memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Ringkasan hasil uji hipotesis yang ditunjukkan oleh tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi positif dengan tingkat probabilitas sebesar 0,024 atau signifikan pada level 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa keahlian DPS memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Semakin banyak Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki keahlian fiqh muamalah dan yurisprudensi atau hukum-hukum yang mengatur mengenai keuangan syariah serta permasalahan mengenai perbankan syariah maka dapat meningkatkan kinerja keuangan bank syariah.

Hal ini juga dijelaskan oleh hasil dari statistik deskriptif yang terdapat pada tabel 4.2, dimana nilai minimum dari variabel keahlian DPS yaitu sebesar 0,50 nilai maksimum sebesar 1, nilai rata-rata sebesar 0,8869 dan nilai deviasi standar sebesar 0,1719. Nilai rata-rata menunjukkan bahwa keahlian DPS pada bank syariah memiliki tingkat rata-rata tinggi. Dari hasil tersebut maka dapat diambil keputusan bahwa keahlian DPS yang tinggi pada bank syariah dipercaya dapat meningkatkan kinerja keuangan bank syariah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mollah & Zaman (2015) yang menemukan fakta bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat memainkan peran pengawasan atau peran penasehat. Penelitian ini mengamati bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank syariah ketika memainkan peran pengawasan sedangkan memiliki hubungan negatif apabila memainkan peran penasehat. Penelitian ini menemukan fakta bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia dan Malaysia lebih memainkan perannya sebagai pengawas, selain itu dalam melakukan pengawasan terhadap produk perbankan syariah maka keahlian DPS mengenai fiqih muamalah dan yurisprudensi atau hukum-hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Karenanya semakin banyak anggota DPS yang memiliki keahlian maka peningkatan terhadap kinerja keuangan bank syariah semakin baik. Hal ini disebabkan karena adanya transaksi khusus yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional sehingga dibutuhkan keahlian khusus bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS).

4.3.5 Pengaruh Pertemuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Pertemuan DPS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Ringkasan hasil uji hipotesis yang ditunjukkan oleh tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi negatif dengan tingkat probabilitas sebesar 0,770 atau tidak signifikan pada level 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan DPS tidak signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Hal ini juga dijelaskan oleh hasil dari statistik deskriptif yang terdapat pada tabel 4.2, dimana nilai minimum dari pertemuan DPS yaitu sebesar 6, nilai maksimum sebesar 30, nilai modus sebesar 12 dan nilai deviasi standar sebesar 4,0784. Nilai maksimum SSBMEETS di Indonesia sebesar 30 sedangkan di Malaysia sebesar 18. Nilai SSBMEETS tersebut menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan DPS di Indonesia lebih sering dilakukan dibandingkan Malaysia. Nilai modus menunjukkan bahwa sebagian besar perbankan syariah telah melakukan pertemuan sebanyak 12 kali dalam satu periode. Nilai deviasi standar menunjukkan bahwa variabel SSBMEETS memiliki persebaran data rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan DPS yang rendah tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah.

Studi empiris yang dilakukan oleh Mollah & Zaman (2015) menjelaskan bahwa adanya kesenjangan dalam literatur ketika memeriksa pengaruh DPS terhadap kinerja keuangan bank syariah. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2015) yang menemukan fakta bahwa frekuensi pertemuan DPS tidak berpengaruh pada pengungkapan aspek produk atau pun jasa berdasarkan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Hal ini disebabkan karena pertemuan DPS tidak membahas mengenai peningkatan kinerja bank syariah akan tetapi lebih memastikan bank syariah tidak melanggar ketentuan syariah.

4.3.6 Pengaruh Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Remunerasi DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Ringkasan hasil uji hipotesis yang ditunjukkan oleh tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi positif dengan tingkat probabilitas sebesar 0,000 atau signifikan pada level 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa remunerasi DPS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Hal ini juga dijelaskan oleh hasil dari statistik deskriptif yang terdapat pada tabel 4.2, dimana nilai minimum dari remunerasi DPS yaitu sebesar -0,0428 nilai maksimum remunerasi DPS sebesar 0,1711 nilai rata-rata sebesar 0,0122 dan nilai deviasi standar sebesar 0,0292. Nilai maksimum SSBREMUN di Indonesia sebesar 0,1711 sedangkan di Malaysia sebesar 0,0178. Nilai SSBREMUN tersebut menunjukkan bahwa remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan Malaysia yaitu paling banyak sebesar 0,17% dari total laba bersih (*net income*) bank syariah. Nilai rata-rata dari remunerasi DPS menunjukkan bahwa jumlah remunerasi DPS pada bank syariah memiliki persebaran data rendah. Dari hasil tersebut maka dapat diambil keputusan bahwa remunerasi DPS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Main *et. Al* (1996) yang menemukan hubungan yang positif antara remunerasi

dewan dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini juga di dukung oleh Conyon & Schwalbach (2000) menggunakan data di Inggris dan Jerman, Kato & Kubo (2006) menggunakan data di Jepang, Merhebi *et. Al* (2006) di Australia dan Lee & Isa (2015) di Malaysia yang menemukan hubungan positif antara remunerasi eksekutif dengan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menemukan fakta bahwa remunerasi DPS di Malaysia dan Indonesia memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Menurut Al Qari (2002) remunerasi DPS ini harus di ungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan untuk menghindari konflik antar *stakeholder* serta mengurangi *agency cost* sehingga dapat melakukan penghematan serta dapat memaksimalkan keuntungan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran komite audit (ACSIZE), pertemuan komite audit (ACMEETS), ukuran DPS (SSBSIZE), keahlian DPS (SSBEXPERT), pertemuan DPS (SSBMEETS), remunerasi DPS (SSBREMUN) terhadap kinerja keuangan bank syariah. Selain itu penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran bank syariah (SIZE) dan umur bank syariah (AGE). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan syariah yang terdapat di 2 (dua) negara yaitu Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di otoritas moneter setiap negara seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia dan Bank Negara Malaysia (BNM) di Malaysia periode 2014-2018. Sampel pengamatan dalam penelitian ini berjumlah 105 dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Studi empiris dari penelitian terdahulu mengenai *Corporate Governance* (CG) pada bank syariah masih terbatas. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas mengenai *Corporate Governance* (CG) pada bank konvensional atau perusahaan secara umum. Berdasarkan hasil penelitian dan uji hipotesis, maka kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Penelitian ini sesuai dengan teori agensi (*agency theory*) yang

menyatakan bahwa ukuran komite audit dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya jumlah komite audit pada bank syariah akan dapat meningkatkan kinerja keuangan.

2. Pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini membuktikan bahwa fokus utama komite audit adalah untuk menjamin kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik tetapi tidak meningkatkan kinerja keuangan.
3. Ukuran DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini berarti semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank syariah maka peningkatan terhadap kinerja keuangan bank syariah tersebut semakin baik.
4. Keahlian DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini berarti semakin banyak Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki keahlian dalam fiqih muamalah dan yurisprudensi atau hukum syariah maka peningkatan kinerja keuangan bank syariah semakin baik.
5. Pertemuan DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah. Hal ini disebabkan karena pertemuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak membahas mengenai peningkatan kinerja bank syariah akan tetapi lebih memastikan bank syariah tidak melanggar ketentuan hukum-hukum syariah.
6. Remunerasi DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Pengaruh remunerasi DPS ini disebabkan karena pengungkapan remunerasi di laporan tahunan dapat mengurangi konflik kepentingan. Hal ini tentunya dapat mengurangi *agency cost* sehingga perbankan syariah dapat melakukan

penghematan serta dapat memaksimalkan keuntungan.

7. Variabel kontrol yaitu ukuran bank syariah memiliki pengaruh negatif. Sedangkan umur bank syariah tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan - keterbatasan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya agar peningkatan kinerja keuangan bank syariah menjadi lebih baik. Keterbatasan-keterbatasan dari penelitian ini antara lain :

1. Terdapat perbankan syariah yang tidak mempublikasikan laporan tahunan (*Annual Report*) secara lengkap, selain itu adanya perbankan syariah yang tidak menyediakan informasi secara utuh tentang variabel yang diteliti.
2. Penelitian ini masih terbatas di 2 (dua) negara yaitu Indonesia dan Malaysia yang merupakan peringkat dari *Global Islamic Financial Report* (GIFR, 2019).
3. Sampel penelitian ini masih terbatas pada perbankan syariah yang mempunyai status Bank Umum Syariah (BUS) dan belum melibatkan Unit Usaha Syariah (UUS).

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain yang memiliki hubungan kuat terhadap kinerja keuangan bank syariah.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian mengenai peningkatan kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan objek negara yang lebih banyak, dan tidak hanya terbatas di Asia akan tetapi dapat menggunakan objek perbankan syariah di Eropa.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan objek perbankan syariah yang bukan hanya berstatus Bank Umum Syariah (BUS) akan tetapi dapat juga menggunakan perbankan syariah yang memiliki status Unit Usaha Syariah (UUS).

DAFTAR PUSTAKA

- AAOFI. (2008). *Governance Standards for Islamic Financial Institutions*.
- AAOFI. (2010). *Governance Standard for islamic financial institutions, Accounting and Auditing Organization for iIslamic Financial Institutions, Bahrain*.
- Ajili, H., & Bouri, A. (2018). Corporate governance quality of Islamic banks: measurement and effect on financial performance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 470–487. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0131>
- Al Nashmi, A. (2002). *Improving the Shari'a supervisory boards' identity and practices to fulfill the needs of Islamic financial institutions*.
- Al Qari, M. (2002). *The independence of the Shari'a supervisory boards' members*. 1–19.
- Alnasser, S. A. S., & Muhammed, J. (2012). Introduction to corporate governance from Islamic perspective. *Humanomics*. <https://doi.org/10.1108/08288661211258110>
- Ammann, M., Oesch, D., & Schmid, M. M. (2011). Corporate governance and firm value: International evidence. *Journal of Empirical Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2010.10.003>
- Ari, P. (2015). Dewan Pengawas Syariah Dan Pengungkapan. *Dewan Pengawas Syariah Dan Pengungkapan Aspek Lingkungan, Produk Dan Jasa Pada Bank Syariah, 1*, 169–170.
- Bakr, M. (2001). *Controlling standards for Islamic financial institutions*. 1–20.
- Black, B. S., Jang, H., & Kim, W. (2006). Does Corporate Governance Predict Firms' Market Values? Evidence from Korea. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 22(2), 366–413. <https://doi.org/10.1093/jleo/ewj018>
- Brick, I. E., Palmon, O., & Wald, J. K. (2006). CEO compensation, director compensation, and firm performance: Evidence of cronyism? *Journal of Corporate Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2005.08.005>
- Brooks , Leonard J, P. D. (2012). *Business and Professional Ethics for Directors, Executives and Accountants* (7th ed.). United States of America: South Western Cengage Learning.
- Brown, L. D., & Caylor, M. L. (2006). Corporate governance and firm valuation. *Journal of Accounting and Public Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2006.05.005>
- Bukair, A. A., & Abdul Rahman, A. (2015). Bank performance and board of

- directors attributes by Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2013-0111>
- Bukhari, K. S., Awan, H. M., & Ahmed, F. (2013). An evaluation of corporate governance practices of Islamic banks versus Islamic bank windows of conventional banks: A case of Pakistan. *Management Research Review*. <https://doi.org/10.1108/01409171311315003>
- Chan, K. C., & Li, J. (2008). Audit committee and firm value: Evidence on outside top executives as expert-independent directors. *Corporate Governance: An International Review*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2008.00662.x>
- Chariri. (2012). *Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Asia)*, 168–182.
- Cheung, Y. L., Jiang, P., Limpaphayom, P., & Lu, T. (2008). Does corporate governance matter in China? *China Economic Review*. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2008.01.002>
- Canyon, M. J., & Murphy, K. J. (2007). The prince and the pauper? Ceo pay in the United States and United Kingdom. In *Corporate Governance and Corporate Finance: A European Perspective*. <https://doi.org/10.4324/9780203940136>
- Canyon, M. J., & Schwalbach, J. (2000). Executive Compensation: Evidence from the UK and Germany. *Long Range Planning*. [https://doi.org/10.1016/s0024-6301\(00\)00052-2](https://doi.org/10.1016/s0024-6301(00)00052-2)
- Daniri, A. (2014). *Lead by GCG*. Jakarta: Gagas Bisnis Indonesia.
- Darmadi, S. (2013). Corporate governance disclosure in the annual report. *Humanomics*. <https://doi.org/10.1108/08288661311299295>
- Dobson, J. (1993). Moral Hazard , Adverse Selection and Reputation : A Synthesis. *Managerial Finance*, 19(6), 2–8. <https://doi.org/10.1108/eb013725>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (2008). Separation of ownership and control. In *The Value Creating Board: Corporate Governance and Organizational Behaviour*. <https://doi.org/10.4324/9780203888711>
- Fung, S., Jo, H., Fung, S., & Jo, H. (2009). *Agency problems in stock market-driven acquisitions*. <https://doi.org/10.1108/14757700911006958>
- Ghayad, R. (2008). Corporate governance and the global performance of Islamic banks. *Humanomics*, 24(3), 207–216.

<https://doi.org/10.1108/08288660810899368>

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- GIFR. (2019). *Global Islamic Financial Report*.
- Grassa, R. (2013). Shariah supervisory system in Islamic financial institutions: New issues and challenges: A comparative analysis between Southeast Asia models and GCC models. *Humanomics*. <https://doi.org/10.1108/H-01-2013-0001>
- Hamza, H. (2013). Sharia governance in Islamic banks: effectiveness and supervision model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2013-0021>
- HASAN, Z. (2009). Corporate Governance from Western and Islamic Perspectives. *The Islamic Quarterly*.
- Hsu, W. Y., & Petchsakulwong, P. (2010). The impact of corporate governance on the efficiency performance of the Thai non-life insurance industry. *Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice*. <https://doi.org/10.1057/gpp.2010.30>
- Issa, M. (2009). *Conflicts of interest in the work of Shari'a supervisory boards*. 1–25. Bahrain: Proceedings of Eighth Annual Conference of AAOIFI.
- Jaeckle, T. (2010). Conflict of Interest in Policing: Problems, Practices, and Principles. Cindy Davids. Conflict of Interest in Policing: Problems, Practices, and Principles . Sydney: Institute of Criminology Press 2008. 287 pp. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 33(2), 399–400. <https://doi.org/10.1108/13639511011044966>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Karamanou, I., & Vafeas, N. (2005). The association between corporate boards, audit committees, and management earnings forecasts: An empirical analysis. *Journal of Accounting Research*. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2005.00177.x>
- Kartika, I. (2014). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite-komite dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Perbankan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013*.
- Kato, T., & Kubo, K. (2006). CEO compensation and firm performance in Japan: Evidence from new panel data on individual CEO pay. *Journal of the*

Japanese and International Economies.
<https://doi.org/10.1016/j.jjie.2004.05.003>

Khoirudin, A. (2013). Corporate governance dan pengungkapan Islamic social reporting pada perbankan syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2.

Kreps. (1990). *A Course in Microeconomic Theory*. New Jersey: Princeton University Press.

Larcker, D. F., Richardson, S. A., & Tuna, I. (2007). Corporate governance, accounting outcomes, and organizational performance. *Accounting Review*.
<https://doi.org/10.2308/accr.2007.82.4.963>

Lee, S. P., & Isa, M. (2015). Directors' remuneration, governance and performance: the case of Malaysian banks. *Managerial Finance*.
<https://doi.org/10.1108/MF-08-2013-0222>

Linda, A. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Tahunan. *Dinamika Akuntansi*, 4, 55–63.

Magalhães, R., & Al-Saad, S. (2013). Corporate governance in Islamic financial institutions: The issues surrounding unrestricted investment account holders. *Corporate Governance (Bingley)*.
<https://doi.org/10.1108/14720701311302404>

Main, B. G. M., Bruce, A., & Buck, T. (1996). Total Board Remuneration and Company Performance. *The Economic Journal*.
<https://doi.org/10.2307/2235204>

Manik, T. (2011). Analisis pengaruh kepemilikan manajemen, komisaris independen, komite audit, umur perusahaan terhadap kinerja keuangan (studi empiris perusahaan property dan real estate di BEI). *JEMI*, 2.

Markonah, Cahaya, Y. F., & Riwayati, H. E. (2016). The Effect of Banking Company Performance toward Good Corporate Governance Listed in Indonesia Stock Exchange. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.024>

Megasari, D. (n.d.). *Pengaruh peran komite audit dan dewan pengawas syariah dalam mewujudkan*.

Menne, F. (2016). Evidence of CSR Practices of Islamic Financial Institutions in Indonesia. In *Advances in Islamic Finance, Marketing, and Management*.
<https://doi.org/10.1108/978-1-78635-899-820161018>

Merhebi, R., Pattenden, K., Swan, P. L., & Zhou, X. (2006). Australian chief executive officer remuneration: Pay and performance. *Accounting and Finance*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-629x.2006.00178.x>

- Mersni, H., & Ben Othman, H. (2016). The impact of corporate governance mechanisms on earnings management in Islamic banks in the Middle East region. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2014-0039>
- Mollah, S., Hassan, M. K., Al Farooque, O., & Mobarek, A. (2017a). The governance, risk-taking, and performance of Islamic banks. *Journal of Financial Services Research*. <https://doi.org/10.1007/s10693-016-0245-2>
- Mollah, S., Hassan, M. K., Al Farooque, O., & Mobarek, A. (2017b). The governance, risk-taking, and performance of Islamic banks. *Journal of Financial Services Research*, 51(2), 195–219. <https://doi.org/10.1007/s10693-016-0245-2>
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking and Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030>
- Nathan Garas, S. (2012). The conflicts of interest inside the Shari'a supervisory board. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(2), 88–105. <https://doi.org/10.1108/17538391211233399>
- Nguyen, T., Locke, S., & Reddy, K. (2014). A dynamic estimation of governance structures and financial performance for Singaporean companies. *Economic Modelling*. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.03.013>
- OECD. (2015). G20/OECD Principles of Corporate Governance, The Organization for Economic Cooperation and Development, Paris,. Retrieved August 10, 2019, from www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
- Price, R., Román, F. J., & Rountree, B. (2011). The impact of governance reform on performance and transparency. *Journal of Financial Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.08.005>
- Rajput, N., & Joshi, B. (2014). Shareholder Types, Corporate Governance and Firm Performance: An Anecdote from Indian Corporate Sector. *Asian Journal of Finance & Accounting*. <https://doi.org/10.5296/ajfa.v7i1.6070>
- Renders, A., Gaeremynck, A., & Sercu, P. (2010). Corporate-governance ratings and company performance: A cross-European study. *Corporate Governance: An International Review*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2010.00791.x>
- Sheikh, N. A., & Kareem, S. (2015). The Impact of Board Structure , Ownership Concentration , and CEO Remuneration on Performance of Islamic Commercial Banks in Pakistan. *Pakistan Journal of Islamic Research*, 15, 49–59.
- Soemarso S.R. (2017). *Etika dalam Bisnis & Profesi Akuntan dan Tata Kelola*

Perusahaan.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wild, J. J. (1996). The Audit Committee and Earnings Quality. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*.
<https://doi.org/10.1177/0148558X9601100206>
- Yin, F., Gao, S., Li, W., & Lv, H. (2012). Determinants of audit committee meeting frequency: evidence from Chinese listed companies. *Managerial Auditing Journal*, 27(10), 425–444.
<https://doi.org/10.1108/02686901211218003>
- Zhou, X. (2000). CEO pay, firm size, and corporate performance: Evidence from Canada. *Canadian Journal of Economics*. <https://doi.org/10.1111/0008-4085.00013>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN A

DAFTAR SAMPEL PENELITIAN

No	Nama Bank	Negara	Tahun
1	PT. Bank Syariah Mandiri	INDONESIA	2014
2	PT. Bank BNI Syariah	INDONESIA	2014
3	PT. Bank Mega Syariah	INDONESIA	2014
4	PT. Bank BTPN Syariah	INDONESIA	2014
5	PT. Bank Muamalat Syariah	INDONESIA	2014
6	PT. Bank Victoria Syariah	INDONESIA	2014
7	PT. Bank BRI Syariah	INDONESIA	2014
8	PT. Bank Jabar Banten Syariah	INDONESIA	2014
9	PT. Bank Panin Dubai Syariah	INDONESIA	2014
10	PT. BCA Syariah	INDONESIA	2014
11	PT. Maybank Syariah Indonesia	INDONESIA	2014
12	PT. Bank Bukopoin Syariah	INDONESIA	2014
13	Affin Islamic Bank Berhad	MALAYSIA	2014
14	Al Rajhi Banking Berhad	MALAYSIA	2014
15	Alliance Islamic Bank Berhad	MALAYSIA	2014
16	AmBank Islamic Berhad	MALAYSIA	2014
17	Bank Islam Malaysia Berhad	MALAYSIA	2014
18	Bank Muamalat Malaysia Berhad	MALAYSIA	2014
19	CIMB Islamic Bank Berhad	MALAYSIA	2014
20	Kuwait Finance House Berhad	MALAYSIA	2014
21	Standard Chartered Saadiq Berhad	MALAYSIA	2014
22	PT. Bank Syariah Mandiri	INDONESIA	2015
23	PT. Bank BNI Syariah	INDONESIA	2015
24	PT. Bank Mega Syariah	INDONESIA	2015
25	PT. Bank BTPN Syariah	INDONESIA	2015
26	PT. Bank Muamalat Syariah	INDONESIA	2015
27	PT. Bank Victoria Syariah	INDONESIA	2015
28	PT. Bank BRI Syariah	INDONESIA	2015
29	PT. Bank Jabar Banten Syariah	INDONESIA	2015
30	PT. Bank Panin Dubai Syariah	INDONESIA	2015
31	PT. BCA Syariah	INDONESIA	2015
32	PT. Maybank Syariah Indonesia	INDONESIA	2015

33	PT. Bank Bukopoin Syariah	INDONESIA	2015
34	Affin Islamic Bank Berhad	MALAYSIA	2015
35	Al Rajhi Banking Berhad	MALAYSIA	2015
36	Alliance Islamic Bank Berhad	MALAYSIA	2015
37	AmBank Islamic Berhad	MALAYSIA	2015
38	Bank Islam Malaysia Berhad	MALAYSIA	2015
39	Bank Muamalat Malaysia Berhad	MALAYSIA	2015
40	CIMB Islamic Bank Berhad	MALAYSIA	2015
41	Kuwait Finance House Berhad	MALAYSIA	2015
42	Standard Chartered Saadiq Berhad	MALAYSIA	2015
43	PT. Bank Syariah Mandiri	INDONESIA	2016
44	PT. Bank BNI Syariah	INDONESIA	2016
45	PT. Bank Mega Syariah	INDONESIA	2016
46	PT. Bank BTPN Syariah	INDONESIA	2016
47	PT. Bank Muamalat Syariah	INDONESIA	2016
48	PT. Bank Victoria Syariah	INDONESIA	2016
49	PT. Bank BRI Syariah	INDONESIA	2016
50	PT. Bank Jabar Banten Syariah	INDONESIA	2016
51	PT. Bank Panin Dubai Syariah	INDONESIA	2016
52	PT. BCA Syariah	INDONESIA	2016
53	PT. Maybank Syariah Indonesia	INDONESIA	2016
54	PT. Bank Bukopoin Syariah	INDONESIA	2016
55	Affin Islamic Bank Berhad	MALAYSIA	2016
56	Al Rajhi Banking Berhad	MALAYSIA	2016
57	Alliance Islamic Bank Berhad	MALAYSIA	2016
58	AmBank Islamic Berhad	MALAYSIA	2016
59	Bank Islam Malaysia Berhad	MALAYSIA	2016
60	Bank Muamalat Malaysia Berhad	MALAYSIA	2016
61	CIMB Islamic Bank Berhad	MALAYSIA	2016
62	Kuwait Finance House Berhad	MALAYSIA	2016
63	Standard Chartered Saadiq Berhad	MALAYSIA	2016
64	PT. Bank Syariah Mandiri	INDONESIA	2017
65	PT. Bank BNI Syariah	INDONESIA	2017
66	PT. Bank Mega Syariah	INDONESIA	2017
67	PT. Bank BTPN Syariah	INDONESIA	2017
68	PT. Bank Muamalat Syariah	INDONESIA	2017
69	PT. Bank Victoria Syariah	INDONESIA	2017
70	PT. Bank BRI Syariah	INDONESIA	2017
71	PT. Bank Jabar Banten Syariah	INDONESIA	2017
72	PT. Bank Panin Dubai Syariah	INDONESIA	2017
73	PT. BCA Syariah	INDONESIA	2017

74	PT. Maybank Syariah Indonesia	INDONESIA	2017
75	PT. Bank Bukopoin Syariah	INDONESIA	2017
76	Affin Islamic Bank Berhad	MALAYSIA	2017
77	Al Rajhi Banking Berhad	MALAYSIA	2017
78	Alliance Islamic Bank Berhad	MALAYSIA	2017
79	AmBank Islamic Berhad	MALAYSIA	2017
80	Bank Islam Malaysia Berhad	MALAYSIA	2017
81	Bank Muamalat Malaysia Berhad	MALAYSIA	2017
82	CIMB Islamic Bank Berhad	MALAYSIA	2018
83	Kuwait Finance House Berhad	MALAYSIA	2017
84	Standard Chartered Saadiq Berhad	MALAYSIA	2017
85	PT. Bank Syariah Mandiri	INDONESIA	2018
86	PT. Bank BNI Syariah	INDONESIA	2018
87	PT. Bank Mega Syariah	INDONESIA	2018
88	PT. Bank BTPN Syariah	INDONESIA	2018
89	PT. Bank Muamalat Syariah	INDONESIA	2018
90	PT. Bank Victoria Syariah	INDONESIA	2018
91	PT. Bank BRI Syariah	INDONESIA	2018
92	PT. Bank Jabar Banten Syariah	INDONESIA	2018
93	PT. Bank Panin Dubai Syariah	INDONESIA	2018
94	PT. BCA Syariah	INDONESIA	2018
95	PT. Maybank Syariah Indonesia	INDONESIA	2018
96	PT. Bank Bukopoin Syariah	INDONESIA	2018
97	Affin Islamic Bank Berhad	MALAYSIA	2018
98	Al Rajhi Banking Berhad	MALAYSIA	2018
99	Alliance Islamic Bank Berhad	MALAYSIA	2018
100	AmBank Islamic Berhad	MALAYSIA	2018
101	Bank Islam Malaysia Berhad	MALAYSIA	2018
102	Bank Muamalat Malaysia Berhad	MALAYSIA	2018
103	CIMB Islamic Bank Berhad	MALAYSIA	2018
104	Kuwait Finance House Berhad	MALAYSIA	2018
105	Standard Chartered Saadiq Berhad	MALAYSIA	2018

LAMPIRAN B

HASIL ANALISIS SPSS REGRESI LINEAR BERGANDA

1. UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		105	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	1,80719744	
Most Extreme Differences	Absolute	,060	
	Positive	,051	
	Negative	-,060	
Test Statistic		,060	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,819 ^e	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,809
	Upper Bound		,829

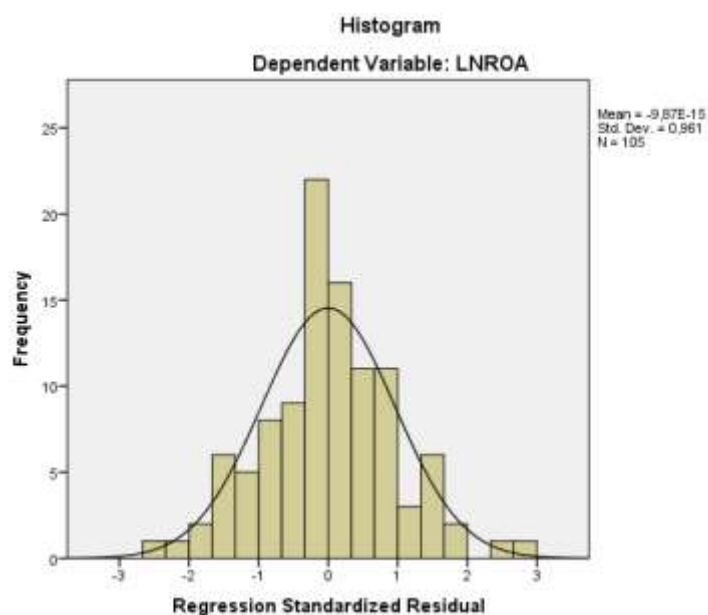
a. Test distribution is Normal.

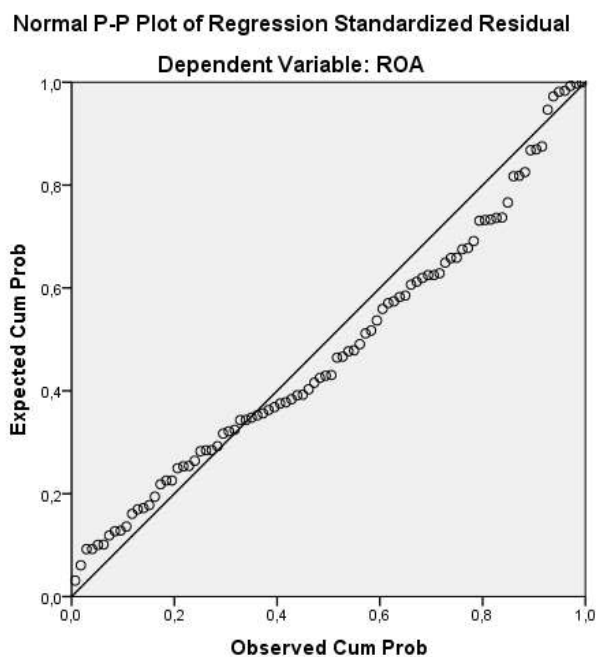
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 334431365.





2. UJI MULTIKOLONEARITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	44,541	12,475			
	ACSIZE	1,760	,679	,197	,796	1,257
	ACMEETS	-,632	,389	-,123	,802	1,247
	SSBSIZE	3,713	,671	,658	,326	3,071
	SSBEXPERT	1,936	,844	,162	,920	1,087
	SSBMEETS	-,203	,694	-,024	,684	1,462
	SSBREMUN	39,418	6,921	,429	,811	1,232
	SIZE	-20,462	4,471	-,516	,362	2,761
	AGE	-,617	,340	-,195	,400	2,497

a. Dependent Variable: ROA

4. UJI HETEROSKEDASTISITAS

Uji Glejser sebelum Tranform

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,144	,047		3,057	,003
	ACSIZE	,003	,002	,139	1,435	,155
	ACMEETS	-,001	,000	-,176	-1,894	,061
	SSBSIZE	-,003	,002	-,192	-1,304	,195
	SSBEXPERT	,029	,013	,200	2,138	,035
	SSBMEETS	-,002	,001	-,282	-2,628	,010
	SSBREMUN	-,181	,079	-,215	-2,295	,024
	SIZE	-,006	,002	-,323	-2,308	,023
	AGE	,000	,000	-,082	-,581	,563

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Uji Glejser setelah Tranform

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3,250	7,511		,433	,666
	LNACSIZE	-,036	,409	-,010	-,089	,929
	LNACMEETS	-,173	,234	-,079	-,737	,463
	LNSSBSIZE	-,765	,404	-,319	-1,894	,061
	LNSSBEXPERT	,841	,508	,166	1,656	,101
	LNSSBMEETS	,120	,418	,033	,287	,775
	LNSSBREMUN	-3,204	4,167	-,082	-,769	,444
	LNSIZE	-,223	2,692	-,013	-,083	,934
	LNAGE	,180	,205	,133	,877	,382

a. Dependent Variable: ABS_RES1

4. UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,747 ^a	,557	,521	1,880990736	1,978

a. Predictors: (Constant), LNAGE, LNACMEETS, LNSSBEXPERT, LNSSBREMUN, LNACSIZE, LNSSBMEETS, LNSIZE, LNSSBSIZE

b. Dependent Variable: LNROA

5. UJI SIMULTAN (UJI F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	427,781	8	53,473	15,113	,000 ^b
	Residual	339,660	96	3,538		
	Total	767,441	104			

a. Dependent Variable: LNROA

b. Predictors: (Constant), LNAGE, LNACMEETS, LNSSBEXPERT, LNSSBREMUN, LNACSIZE, LNSSBMEETS, LNSIZE, LNSSBSIZE

6. UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,747 ^a	,557	,521	1,880990736

a. Predictors: (Constant), LNAGE, LNACMEETS, LNSSBEXPERT, LNSSBREMUN, LNACSIZE, LNSSBMEETS, LNSIZE, LNSSBSIZE

b. Dependent Variable: LNROA

7. UJI SIGNIFIKAN PARAMETER INDIVIDUAL (UJI T)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	44,541	12,475		3,570	,001
	ACSIZE	1,760	,679	,197	2,590	,011
	ACMEETS	-,632	,389	-,123	-1,625	,107
	SSBSIZE	3,713	,671	,658	5,534	,000
	SSBEXPERT	1,936	,844	,162	2,295	,024
	SSBMEETS	-,203	,694	-,024	-,293	,770
	SSBREMUN	39,418	6,921	,429	5,695	,000
	SIZE	-20,462	4,471	-,516	-4,577	,000
	AGE	-,617	,340	-,195	-1,816	,073

a. Dependent Variable: ROA